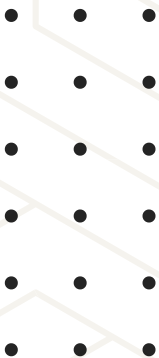


KINERJA BPOM DALAM ANGKA TRIWULAN II

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

2025



2025

KINERJA BPOM

DALAM ANGKA TRIWULAN II



SAMBUTAN KEPALA BPOM RI



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat Rahmad dan RidhoNya sehingga BPOM dapat terus hadir melayani dan melindungi masyarakat melalui jaminan Obat dan Makanan yang aman, berkualitas/bermanfaat, dan bermutu. Kinerja BPOM sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dituangkan dalam “Kinerja BPOM Dalam Angka”. Buku ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPOM dalam pelaksanaan anggaran pemerintah dan juga sumber informasi tentang hasil - hasil pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam buku ini disampaikan hasil pengawasan Obat dan Makanan baik yang dilakukan BPOM sendiri maupun bermitra dengan pemangku kepentingan yang mencakup standardisasi, evaluasi pre-market, hingga pengawasan post-market yang disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, beberapa kinerja yang telah dicapai BPOM di antaranya adalah persetujuan 101.396 NIE, pemeriksaan terhadap 11.650 sarana produksi dan sarana distribusi, pengujian 18.871 sampel, 115 perkara, dan 126 kegiatan pelaksanaan KIE.



Di tengah dinamika global dan tantangan pengawasan yang semakin kompleks, termasuk isu-isu krusial seperti maraknya peredaran obat ilegal dan pangan yang tidak aman, BPOM semakin memperkuat upaya pengawasan dan penegakan hukum. Kasus-kasus besar seperti peredaran obat-obatan yang mengandung zat berbahaya dan skandal impor pangan ilegal menunjukkan betapa pentingnya peran BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat. Dengan inovasi teknologi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, BPOM berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. BPOM juga aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan mendukung pelaku usaha, termasuk UMKM, agar dapat menghasilkan produk yang aman dan berdaya saing.

Terima kasih kepada seluruh jajaran BPOM serta mitra kerja atas kinerja yang dicapai sampai dengan Triwulan II Tahun 2025. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua mitra kerja BPOM sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana kegiatan agar terus berupaya bersama meningkatkan kinerja pada masa mendatang dalam upaya melayani dan melindungi masyarakat.

Jakarta, 25 September 2025
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,

TARUNA IKRAR

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA BPOM RI	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
HIGHLIGHT	1
BAB 1 Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat, dan Mutu Produk Obat dan Makanan	5
BAB 2 Penindakan di Bidang Obat dan Makanan	12
BAB 3 Penyusunan Peraturan/Standar/Pedoman	17
BAB 4 Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	21
BAB 5 Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan	23
BAB 6 Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat	26
BAB 7 Digitalisasi Pelayanan Publik	38
BAB 8 Perkuatan Peraturan Perundang-Undangan Pengawasan Obat dan Makanan	43
BAB 9 Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	47
BAB 10 Kerjasama Internasional	52
BAB 11 Sumber Daya Manusia	60
BAB 12 Realisasi Anggaran Sampai dengan Maret 2024	62
Penutup	64
Lampiran	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Profil Registrasi Obat dan Makanan	5
Gambar 2. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/Dipublikasikan	5
Gambar 3. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan	6
Gambar 4. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan	6
Gambar 5. Profil Sertifikasi Obat dan Makanan	8
Gambar 6. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan	8
Gambar 7. Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan	9
Gambar 8. Peta Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan	12
Gambar 9. Rekomendasi Intelijen yang Dihasilkan s.d. Triwulan II Tahun 2025	13
Gambar 10. Hasil Patroli Siber Obat dan Makanan s.d. Triwulan II Tahun 2025	14
Gambar 11. Grafik Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan Seluruh Indonesia s.d. Triwulan II Tahun 2025	15
Gambar 12. Jumlah Publikasi Siaran Pers/Penjelasan/Klarifikasi Badan POM s.d. Triwulan II Tahun 2025	26
Gambar 13. Jumlah Pelayanan Informasi kepada Media s.d. Triwulan II tahun 2025	26
Gambar 14. Tren Tonasi Pemberitaan Terkait Isu Obat dan Makanan s.d. Triwulan II Tahun 2025	27
Gambar 15. Sebaran Media Pemberitaan Isu Obat dan Makanan s.d. Triwulan II Tahun 2025	28
Gambar 16. Total Unggahan Media Sosial Badan POM Berdasarkan Platform s.d. Triwulan II Tahun 2025	29
Gambar 17. Pertumbuhan Audiens Berdasarkan Platform s.d. Triwulan II Tahun 2025	30
Gambar 18. Engagement Per Platform s.d. Triwulan II Tahun 2025	30
Gambar 19. Top Engagement Content terkait Badan POM pada Platform Facebook, X, Instagram dan Youtube s.d. Triwulan II Tahun 2025..	31
Gambar 20. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2025	32
Gambar 21. Jumlah Permintaan Informasi Publik s.d. Triwulan II Tahun 2025.....	33
Gambar 22. Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM Berdasarkan Profesi	34
Gambar 23. Profil Media Permintaan Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM	35
Gambar 24. Profil Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan oleh Badan POM Berdasarkan Komoditi	35
Gambar 25. Topik Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan atau Ditanyakan kepada Badan POM	36
Gambar 26. Layanan Advokasi Hukum Badan POM s.d. Triwulan II Tahun 2025	45
Gambar 27. Layanan Penanganan Perkara Badan POM s.d. Triwulan II Tahun 2025.....	45
Gambar 28. Peserta The 7 th Asian Network Meeting yang Diselenggarakan di Tokyo, Jepang pada Tanggal 22-23 April 2025.....	52
Gambar 29. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan POM dengan United States Pharmacopeia di Maryland, Amerika Serikat.....	54
Gambar 30. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan POM dengan PBNU di Jakarta pada Tanggal 14 Mei 2025	55
Gambar 31. Kepala Badan POM Menerima Kunjungan Perwakilan Gates Foundation di Kantor Badan POM, Jakarta pada Tanggal 15 Mei 2025	56
Gambar 32. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan POM dengan BPJS Kesehatan serta Sejumlah Asosiasi dan Organisasi Kemasyarakatan di Kantor Badan POM, Jakarta pada Tanggal 24 Juni 2025	57



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Target)	7
Tabel 2. Profil Laporan Efek Samping	10
Tabel 3. Realisasi Anggaran s.d Juni 2025.....	62



Kepala BPOM Kukuhkan 45 Finalis Puteri Indonesia 2025 Sebagai Duta Obat dan Makanan Aman



Jakarta – Bertepatan dengan Hari Kartini yang jatuh pada Senin (21/4/2025), BPOM menerima kehadiran 45 Kartini milenial dari 34 provinsi di Indonesia, yaitu Finalis Puteri Indonesia Tahun 2025. Ke-45 finalis hadir untuk mendapatkan pembekalan dan pengetahuan tentang kosmetik aman. Mereka diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan BPOM dalam melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang menjangkau masyarakat ke berbagai daerah. Untuk menobatkan peran para finalis Puteri Indonesia sebagai duta KIE BPOM, Kepala BPOM mengukuhkan ke-45 finalis sebagai Duta Obat dan Makanan Aman.

Dorong Pembentukan Duta Anti Rokok di Sekolah, BPOM Gelar Game Edukasi untuk Pelajar



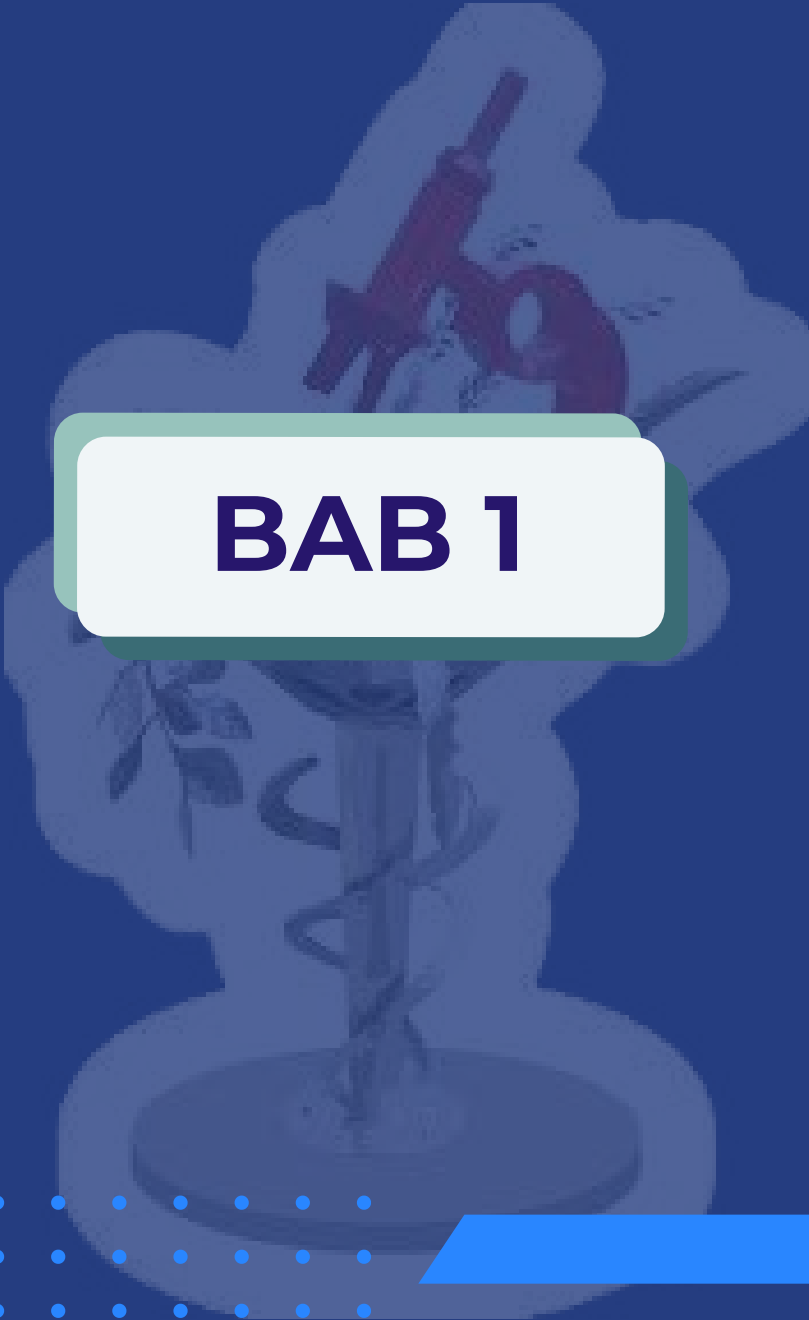
Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) yang jatuh pada 31 Mei, BPOM menggelar kegiatan bertajuk Lomba Game Edukasi Bahaya Merokok bagi pelajar SMA/SMK/ sederajat se-Jakarta, yang dilaksanakan di Aula Gedung Bhineka Tunggal Ika, Rabu (14/5/2025). Kegiatan ini mengusung tema besar "Lindungi Generasi Sehat, Masa Depan Bangsa dari Bahaya Produk Tembakau demi Indonesia Emas 2045", yang menjadi cerminan komitmen BPOM dalam melindungi generasi muda dari jerat industri tembakau. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan pelajar dan guru pendamping ini, serta para narasumber dan aktivis pengendalian tembakau. Narasumber dan aktivis yang hadir, antara lain Ahli Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel, tim dari South East Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA) Mouhamad Bigwanto, dan tim Traditional Games Returns Aghnina Wahdini.



Green Laboratory Forum and Awards BPOM, Dorong Keberlanjutan dan Efisiensi sebagai Strategi Hadapi Tantangan Global



Jakarta – Kepala BPOM Taruna Ikrar memberikan penghargaan kepada laboratorium di lingkungan unit pelaksana teknis (UPT) BPOM seluruh Indonesia yang dinilai telah menerapkan prinsip aspek green laboratory dalam operasionalnya. Penyerahan dilakukan pada momen Green Laboratory Forum and Awards BPOM yang diselenggarakan di Aula Gedung Bhinneka Tunggal Ika pada Kamis (26/6/2025). Dari 76 laboratorium yang dimiliki UPT BPOM di seluruh Indonesia, 38 balai menjadi peserta lomba untuk dilakukan penilaian oleh Tim Green Laboratory PPPOMN sebagai tim juri.

The background features a large, faint, light-blue illustration of a caduceus (a staff with a snake entwined around it) and various medical instruments like a syringe and forceps. The entire scene is set against a dark blue background with abstract geometric shapes in green and purple in the top-left corner and a grid of small blue dots in the bottom-left corner.

BAB 1

BAB 1

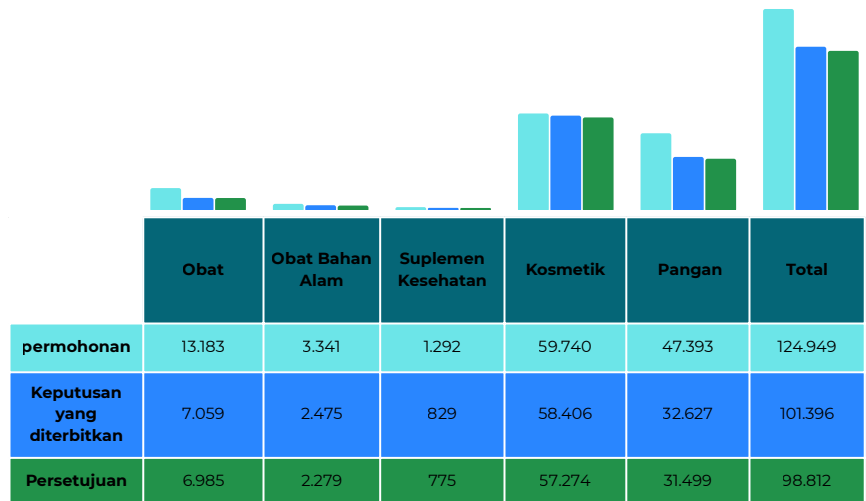
Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat, dan Mutu Produk Obat dan Makanan

PENGAWASAN PRE-MARKET

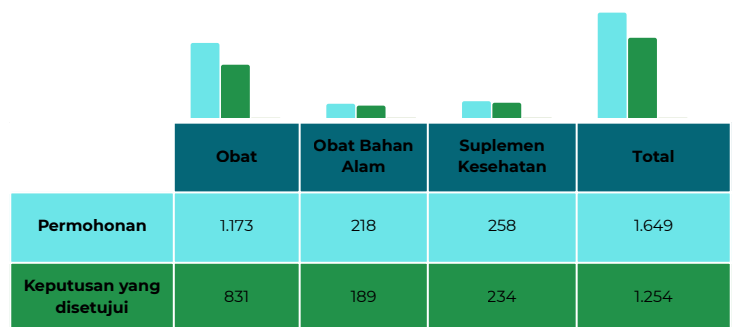
Sebelum Obat dan Makanan diproduksi atau diimpor dan diedarkan di wilayah Indonesia, Obat dan Makanan harus melalui registrasi oleh Badan POM untuk dievaluasi terkait aspek keamanan, khasiat dan mutu serta informasi melalui penandaan/label.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, telah diterbitkan 101.396 keputusan dan 98.812 persetujuan izin edar dari 124.949 berkas permohonan registrasi Obat dan Makanan.

Untuk melindungi masyarakat dari klaim yang menyesatkan, Badan POM telah melakukan evaluasi rancangan iklan terhadap kebenaran klaim iklan khusus obat bebas, obat bebas terbatas, obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang telah mendapatkan ijin edar sebelum ditayangkan atau diedarkan. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, dari 1.649 permohonan persetujuan rancangan iklan, telah disetujui 1.254 (76,05%) iklan.



Gambar 1. Profil Registrasi Obat dan Makanan



Gambar 2. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/Dipublikasikan

PENGAWASAN POST-MARKET

Pengawasan post-market dilakukan setelah produk beredar untuk memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu serta informasi produk sesuai dengan yang disetujui, dilakukan melalui :

Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi

Badan POM melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin kepatuhan implementasi Cara Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan Yang Baik.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 telah diperiksa sebanyak 2.281 sarana produksi Obat dan Makanan dengan 909 (39,85%) sarana adalah TMK.



Gambar 3. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 telah diperiksa sebanyak 9.369 sarana distribusi Obat dan Makanan dengan 2.438 (26,02%) sarana adalah TMK.



Gambar 4. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan

Sampling dan Pengujian Laboratorium

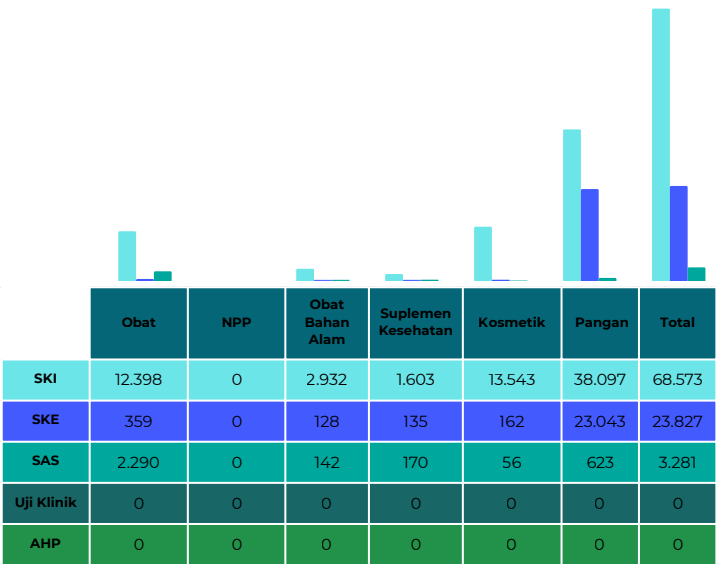
Tabel 1. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Target)

Komoditi	Metode Sampling	Jumlah Sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah sampel yang diuji	Hasil Uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
			TIE / Illegal / Palsu	Kadaluarsa	Rusak				MS	TMS*			
		(a)	(b)			(c)	(d=a-b)	(e=f+g)	(f)	(g)	(h=b+g)	(i=d-e)	(j=b+e)
Obat	Tageted	5.721	0	0	2	111	5.719	3.600	3.498	102	104	2.119	3.602
Obat bahan alam	Tageted	4.256	51	0	6	592	4.199	2.801	2.003	798	855	1.398	2.858
Obat kuasi	Tageted	335	1	0	0	38	334	239	198	41	42	95	240
Suplemen Kesehatan	Tageted	1.234	3	0	0	71	1.231	816	715	101	104	415	819
Kosmetik	Tageted	8.572	3	0	1	996	8.568	5.523	4.491	1.032	1.036	3.045	5.527
Rokok	Tageted	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8	0
Pangan	Tageted	9.576	4	0	2	1.099	9.570	5.819	5.186	633	639	3.751	5.825

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, dari 29.702 sampel yang disampling terdapat 18.871 sampel yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium, dimana terdapat 2.780 (14,73%) sampel tidak memenuhi syarat.

Sertifikasi

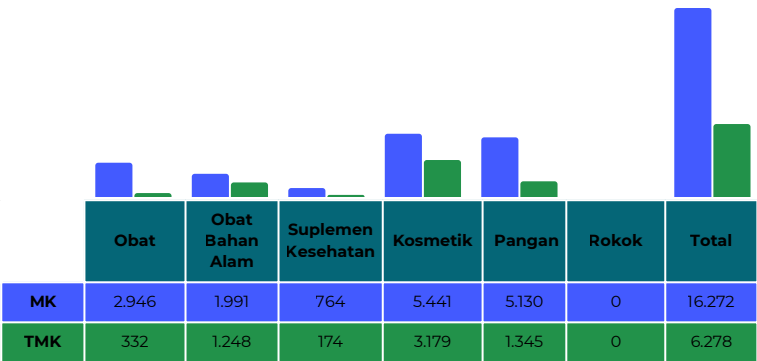
Dalam rangka mendorong ekspor dan impor pengawasan produk dan bahan baku yang masuk ke wilayah Indonesia, Badan POM mengeluarkan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE), SAS (Special Access Scheme), Uji Klinik, dan AHP (Analisa Hasil Pengawasan) Obat dan Makanan. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 telah diterbitkan 68.573 SKI, 23.827 SKE, 3.281 SAS. Belum terdapat Uji Klinik dan AHP yang diterbitkan sampai dengan Triwulan II 2025



Gambar 5. Profil Sertifikasi Obat dan Makanan

Pengawasan Iklan

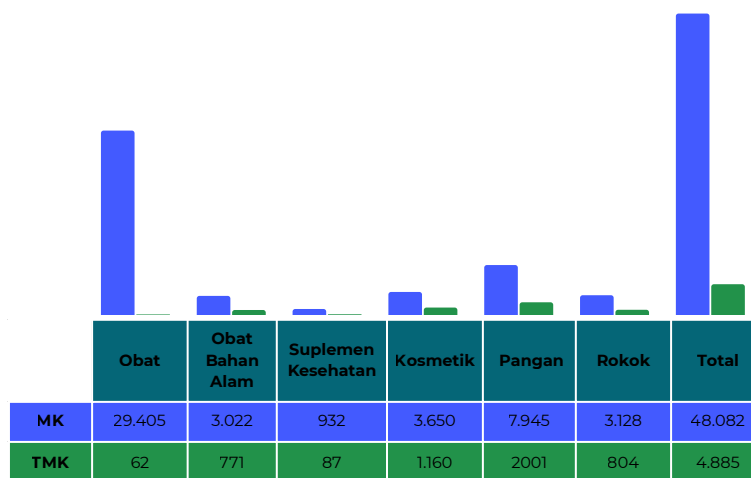
Untuk mencegah masyarakat mendapatkan informasi yang salah dan menyesatkan tentang produk Obat dan Makanan, Badan POM melakukan pengawasan iklan produk di beberapa jenis media antara lain media cetak, televisi, radio, luar ruang dan leaflet/ brosur. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, dari 22.550 iklan Obat dan Makanan yang diawasi, 6.278 (27,84%) iklan tidak memenuhi ketentuan.



Gambar 6. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan

Pengawasan Label

Badan POM juga mengawasi kesesuaian label produk Obat dan Makanan yang beredar dengan yang telah disetujui Badan POM, agar tidak memberikan informasi yang salah dan menyesatkan kepada masyarakat. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, dari 52.967 label Obat dan Makanan yang diawasi, sebanyak 4.885 (9,22%) label tidak memenuhi ketentuan.



Gambar 7. Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan

Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), Monitoring Efek Samping Suplemen Kesehatan (MESSK), Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS)

Tabel 2. Profil Laporan Efek Samping

	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan Tindak Lanjut	%
Obat	0	0	0
Obat bahan alam	254	254	100,00
Suplemen Kesehatan	72	72	100,00
Kosmetik	307	289	94,14

Penggunaan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik oleh berbagai kalangan masyarakat, maka resiko timbulnya efek yang tidak diinginkan tetap ada. Oleh karena itu, Badan POM melakukan evaluasi aspek keamanan produk yang beredar terhadap seluruh laporan efek samping yang diterima dari masyarakat dan/atau tenaga kesehatan, dengan membentuk Tim/Panitia:

- MESO, MESOT, dan MESSK terdiri dari ahli farmakologi/farmakologi klinik dan beberapa tenaga ahli lainnya.
- MESKOS terdiri dari dokter spesialis kulit.

BAB 2



BAB 2

Penindakan di Bidang Obat dan Makanan

1. Peta Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

Dalam melaksanakan strategi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan, diperlukan basis data yang solid untuk kemudian dianalisis dan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan. Untuk membangun basis data tersebut, Badan POM menyusun aplikasi peta kerawanan kejahatan, yaitu peta yang menggambarkan kondisi terkini kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

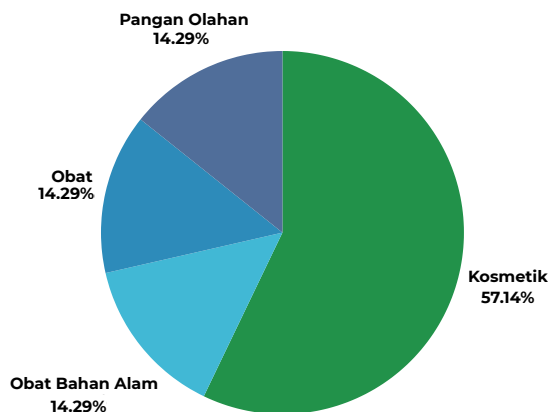


Gambar 8. Peta Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

Sampai dengan triwulan II tahun 2025, data kasus yang sudah diverifikasi untuk menghasilkan data kerawanan kejahatan yang aktual sebanyak 3.510 kasus yang terdiri dari 1.697 kasus terkait obat, 535 kasus terkait obat bahan alam, 43 kasus terkait obat kuasi, 100 kasus suplemen kesehatan, 836 kasus terkait kosmetik dan 299 kasus terkait komoditi pangan olahan.

2. Hasil Kegiatan dan Operasi Intelijen

Peran Badan POM dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan sangat strategis seiring dengan masih banyaknya temuan terkait Obat dan Makanan ilegal baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi ketahanan dan kesehatan masyarakat Indonesia. Salah satu upaya Badan POM untuk meminimalisir hal tersebut adalah dengan melakukan kegiatan/operasi intelijen guna meningkatkan pengawasan peredaran Obat dan Makanan baik pada tahap premarket maupun postmarket. Kegiatan/operasi intelijen telah dilaksanakan di berbagai daerah dengan berbagai kasus komoditi di antaranya kasus obat, NAPPZA, obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan pangan olahan baik yang berujung ditindaklanjuti dengan saksi administrasi maupun *projusticia*.

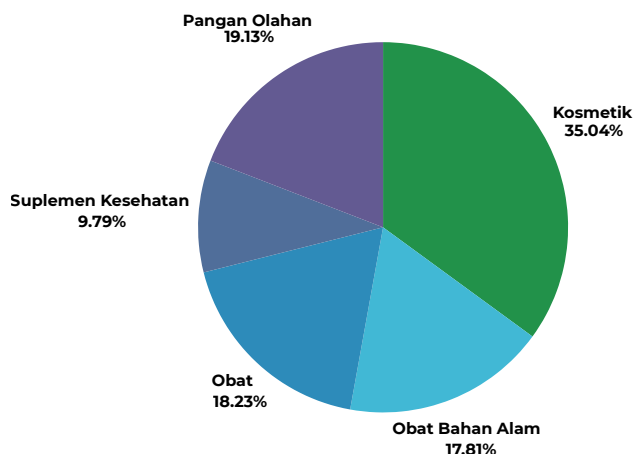


Gambar 9. Rekomendasi Intelijen yang Dihasilkan s.d. Triwulan II Tahun 2025

Sampai dengan triwulan II tahun 2025, telah disusun 125 laporan informasi dari pelaksanaan kegiatan intelijen dan 12 laporan intelijen dari pelaksanaan operasi intelijen. Dari seluruh rangkaian kegiatan dan operasi intelijen tersebut telah dihasilkan 7 rekomendasi intelijen dengan 1 rekomendasi terkait kasus peredaran obat ilegal, 1 rekomendasi terkait kasus obat bahan alam ilegal, 4 rekomendasi kasus kosmetik ilegal serta 1 rekomendasi kasus pangan olahan ilegal yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh unit penerima rekomendasi.

3. Hasil Patroli Siber

Dalam rangka meningkatkan pengawasan peredaran Obat dan Makanan di media daring, Badan POM telah melakukan kegiatan patroli siber untuk melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap penjualan produk Obat dan Makanan ilegal dan/atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.



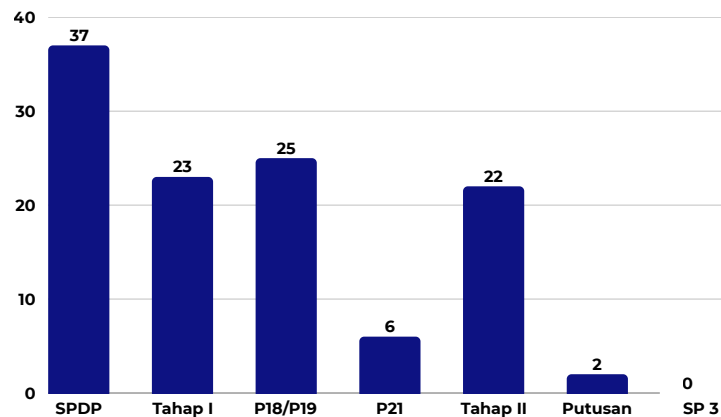
Gambar 10. Hasil Patroli Siber Obat dan Makanan s.d. Triwulan II Tahun 2025

Berdasarkan data hasil patroli siber Obat dan Makanan sampai dengan triwulan II tahun 2025, ditemukan 79.015 link yang teridentifikasi menjual Obat dan Makanan ilegal dan/atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Hasil Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka memberantas dan menertibkan peredaran produk Obat dan Makanan ilegal, Badan POM secara terus menerus melakukan investigasi awal dan penyidikan kasus tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Upaya ini dilakukan secara mandiri maupun bersinergi dengan instansi penegak hukum lainnya dalam kerangka Operasi Gabungan Nasional dan Operasi Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal.

Sampai dengan triwulan II tahun 2025, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM telah menindaklanjuti 115 perkara. Sebanyak 37 perkara masih dalam tahap SPDP, 23 perkara pada tahap I, 25 perkara pada tahap P18/19, 6 perkara pada tahap P21, 22 perkara pada tahap II, 2 perkara sudah sampai pada tahap putusan pengadilan dan tidak terdapat perkara pada tahap SP3.



Gambar 11. Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan Seluruh Indonesia s.d. Triwulan II Tahun 2025

The background is a solid dark blue. In the top-left corner, there are abstract geometric shapes in green and purple. In the center, there is a faint, light blue illustration of a caduceus (a staff with a snake entwined around it) and a pair of surgical forceps. A white rectangular box with rounded corners and a green drop shadow is positioned in the center, containing the text 'BAB 3'. At the bottom-left, there is a grid of small blue dots. At the bottom-right, there is a blue trapezoidal shape pointing to the right.

BAB 3

BAB 3

Penyusunan Peraturan/Standar/Pedoman

Dalam rangka mengawal mutu Obat dan Makanan, telah disusun peraturan/standar/pedoman di bidang Obat dan Makanan.

Obat

Pada tahun 2025, terdapat 8 peraturan/standar/pedoman terkait obat yang disusun oleh Badan POM. Daftar 8 peraturan/standar/pedoman terkait obat beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan II sebagai berikut:

- 1.Revisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Produk Biosimilar (45%).
- 2.Revisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Laksana Registrasi Obat (45%).
- 3.Revisi Peraturan Badan POM Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans (45%).
- 4.Revisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Periklanan Obat dan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.3.02706 Tahun 2002 tentang Promosi Obat (45%).
- 5.Revisi Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (45%).
- 6.Peraturan Badan POM Tentang Standar Cara Pembuatan yang Baik untuk Eksipien yang digunakan dalam Pembuatan Obat (45%).
- 7.Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Rekognisi Laboratorium Eksternal Pengujian Obat dan Bahan Obat (95%).
- 8.Pedoman Verifikasi Pengujian Mikrobiologi Obat dan Bahan Obat (25%).

Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Terdapat 7 peraturan/standar/pedoman terkait obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang disusun oleh Badan POM pada tahun 2025. Daftar 7 peraturan/standar/pedoman beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan II sebagai berikut:

- 1.Revisi Peraturan Badan POM Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam (60%).
- 2.Revisi Peraturan Badan POM Nomor 29 Tahun 2023 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Bahan Alam (40%).
- 3.Revisi Peraturan Badan POM Nomor 32 Tahun 2022 dan Peraturan Badan POM Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan (60%).
- 4.Revisi Peraturan Badan POM Nomor 7 Tahun 2023 tentang Registrasi Obat Kuasi (60%).
- 5.Revisi Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik (25%).
- 6.Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Makanan melalui Peran Serta Masyarakat (100%).
- 7.Revisi Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia (90%).

Sampai dengan triwulan II tahun 2025 telah diselesaikan 100 kajian dengan seluruh kajian diselesaikan tepat waktu (tidak lebih dari 85 hari kerja).

Pangan

Terdapat 6 peraturan/standar/pedoman terkait pangan olahan yang disusun oleh Badan POM pada tahun 2025. Daftar 6 peraturan/standar/pedoman beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan II sebagai berikut:

- 1.Keputusan Kepala Badan POM tentang Informasi Nilai Gizi Usaha Mikro dan Kecil (50%).
- 2.Pedoman Pengelolaan Air Hujan sebagai Bahan Baku Air Minum/Pedoman Persyaratan Mutu dan Keamanan Air Hujan sebagai Bahan Baku Air Minum (50%).
- 3.Revisi Peraturan Badan POM tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan (77,28%).

4. Revisi Peraturan Badan POM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus - Kelompok Dewasa (100%).
5. Revisi Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan (50%).
6. Penyusunan Rancangan Peraturan Badan POM 2025: Revisi Lampiran Peraturan Cemaran (66,67%).

Badan POM juga menyusun rekomendasi kebijakan terkait pangan olahan. Sampai dengan triwulan II tahun 2025 telah diselesaikan 103 rekomendasi kebijakan dan seluruhnya diselesaikan tepat waktu.

The background is a solid dark blue. In the top-left corner, there are abstract geometric shapes in green and purple. In the center, there is a faint, light blue illustration of a caduceus (a staff with a snake entwined around it) and a microscope. A white rectangular box with rounded corners and a green drop shadow is positioned in the center, containing the text 'BAB 4'. At the bottom-left, there is a grid of small blue dots. At the bottom-right, there is a blue trapezoidal shape pointing to the right.

BAB 4

BAB 4

Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Analisis kebijakan Obat dan Makanan dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan sekaligus dasar penyusunan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Data hasil riset dan kajian yang berupa informasi dan rekomendasi dimanfaatkan untuk mengetahui dan meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Pada tahun 2025 terdapat 5 topik riset dan kajian yang dilaksanakan oleh Badan POM. Daftar riset dan kajian beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan II sebagai berikut:

1. Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Tahun 2025 (45%).
2. Pengukuran Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2025 (40%).
3. Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 (50%).
4. Penyusunan Desain dan Metodologi Survei Profil Produk Beredar Tahun 2026 dan Evaluasi Pedoman Sampling 2025 (48%).
5. Analisis Risiko Keamanan Pangan INARAC Tahun 2025 (35%).

The background is a solid dark blue. In the top-left corner, there are abstract geometric shapes in green and purple. In the center, there is a faint, light blue illustration of a caduceus (a staff with a snake entwined around it) and a pair of surgical forceps. A white rectangular box with rounded corners and a green drop shadow is positioned in the center, containing the text 'BAB 5'. At the bottom-left, there is a grid of small blue dots. At the bottom-right, there is a blue trapezoidal shape pointing to the right.

BAB 5

BAB 5

Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan

a. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium

Badan POM terus mendorong peningkatan kualitas laboratorium melalui pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL). SKL adalah standar yang ditetapkan Badan POM sebagai acuan penilaian atau pengukuran kemampuan laboratorium Badan POM dalam pelaksanaan pengujian, pengembangan pengujian, pengembangan baku pembanding dan standar kompetensi.

Hingga triwulan II 2025, tingkat pemenuhan SKL mencapai 65,94%. Capaian ini merupakan agregat dari seluruh laboratorium yang ada di Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pemenuhan SKL antara lain penyusunan tools penilaian SKL, monev pemenuhan SKL, dan bimbingan teknis peningkatan kompetensi pengujian kimia dan mikrobiologi.

b. Metode Analisis yang Dikembangkan

Badan POM terus mengembangkan metode analisis Obat dan Makanan agar dapat melakukan pengujian keamanan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar sesuai dengan persyaratan terkini. Pengembangan metode analisis dilakukan untuk komoditi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, produk biologi, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, air, mikrobiologi dan biologi molekuler. Hasil pengujian digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan bahkan penindakan terkait pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Sampai dengan triwulan II tahun 2025 telah dikembangkan 56 metode analisis.

c. Baku Pembanding yang Dikembangkan

Pengembangan baku pembanding dapat dimanfaatkan oleh Balai Besar/Balai POM untuk memperkuat pengawasan Obat dan Makanan melalui pengujian laboratorium. Sampai dengan triwulan II tahun 2025 telah dikembangkan 24 baku pembanding.

d. Sampel yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu

Badan POM selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholder melalui pelayanan pengujian Obat dan Makanan termasuk sampel pengujian produk biologi dan sampel lot release vaksin dalam rangka pengawasan keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. Sampai dengan triwulan II tahun 2025, terdapat 187 sampel yang telah selesai uji dan memenuhi ketentuan timeline.

e. Alat Pengujian Laboratorium Badan POM yang Dikalibrasi Sesuai Standar

Untuk menjamin validitas pengujian Obat dan Makanan di laboratorium diperlukan alat yang sudah terkalibrasi sesuai standar ISO IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi. Sampai dengan triwulan II tahun 2025, telah dilakukan kalibrasi terhadap 1.145 peralatan laboratorium Obat dan Makanan.

f. Jejaring Pengujian Obat dan Makanan

Kegiatan jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan merupakan kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi dan kapabilitas laboratorium uji, sharing informasi dan teknologi terkini yang sesuai dengan target dari jejaring tersebut. Kegiatan dapat berupa pertemuan, uji profisiensi, kolaborasi, pelatihan, workshop, FGD yang diikuti oleh laboratorium di lingkungan Badan POM maupun eksternal sesuai lingkup pengujian/keahlian. Pada tahun 2025, Badan POM menargetkan partisipasi dalam 42 jejaring laboratorium. Sampai dengan triwulan II tahun 2025, Badan POM telah berpartisipasi dalam 20 jejaring laboratorium.

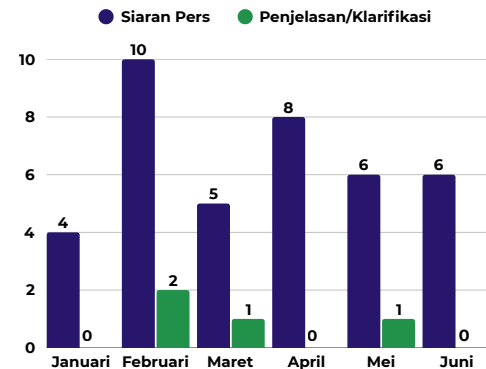
The background is a solid dark blue. In the top-left corner, there are abstract geometric shapes in green and purple. In the center, there is a faint, light blue illustration of a caduceus (a staff with a snake entwined around it) and a pair of surgical forceps. A white rectangular box with rounded corners and a green drop shadow is positioned in the center, containing the text 'BAB 6'. At the bottom-left, there is a grid of small white dots. At the bottom-right, there is a solid blue trapezoidal shape pointing to the right.

BAB 6

BAB 6

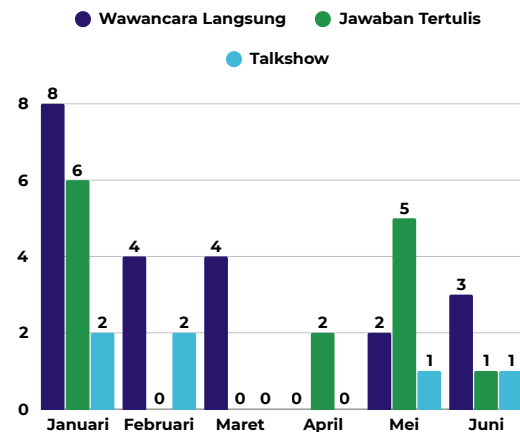
Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat

Sampai dengan triwulan II tahun 2025, Badan POM telah menerbitkan 39 siaran pers dan 4 penjelasan/klarifikasi terkait isu Obat dan Makanan. Pembahasan isu bervariasi dari berbagai komoditas antara lain obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, dan umum. Seluruh siaran pers dan penjelasan/klarifikasi dipublikasikan melalui website dan media sosial Badan POM.



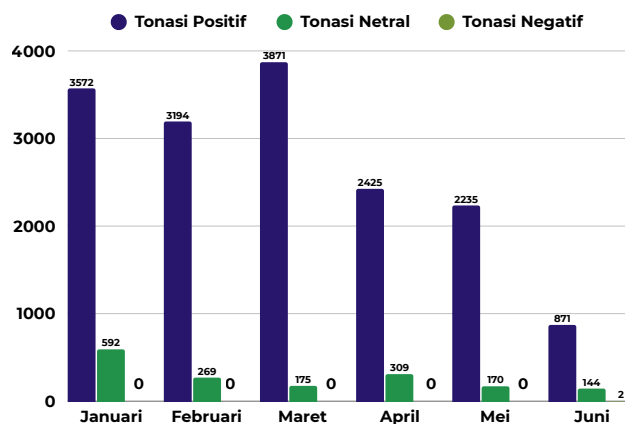
Gambar 12. Jumlah Publikasi Siaran Pers/Penjelasan/Klarifikasi Badan POM s.d. Triwulan II Tahun 2025

Badan POM melakukan kegiatan pelayanan informasi kepada media berupa wawancara, talkshow dan pemberian jawaban tertulis. Sampai dengan triwulan II tahun 2025, Badan POM menerima 49 permohonan wawancara dari media. Sebanyak 41 permohonan sudah ditindaklanjuti dengan rincian 27 wawancara langsung dan 14 jawaban tertulis.



Gambar 13. Jumlah Pelayanan Informasi kepada Media s.d. Triwulan II tahun 2025

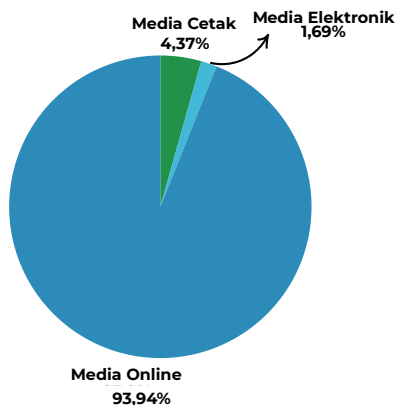
Sampai dengan triwulan II tahun 2025, terdapat 17.829 pemberitaan terkait Obat dan Makanan secara umum maupun Badan POM. Dari seluruh pemberitaan tersebut, sejumlah 16.168 berita (90,68%) bertonasi positif, 1.659 berita (9,31%) bertonasi netral, dan 2 berita (0,01%) bertonasi negatif. Tonasi berita positif muncul dari berbagai kegiatan Badan POM serta banyaknya pernyataan Badan POM dalam sebuah isu yang dikutip media, sedangkan tonasi netral muncul dari pemberitaan dengan topik Obat dan Makanan yang tidak mengutip Badan POM.



Gambar 14. Tren Tonasi Pemberitaan Terkait Isu Obat dan Makanan s.d Triwulan II Tahun 2025

Pada bulan April 2025, Badan POM bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengumumkan daftar 9 produk pangan olahan yang terbukti mengandung unsur babi namun tidak mencantumkan keterangan tersebut pada kemasan. Selanjutnya pada bulan Mei 2025 BPOM menggelar pertemuan strategis dengan tim Gates Foundation. Dalam pertemuan tersebut BPOM resmi memberikan persetujuan untuk pelaksanaan uji klinis fase 3 vaksin Tuberkulosis (TBC) di Indonesia, setelah proses evaluasi ilmiah yang ketat oleh tim independen dari Komite Nasional Penilai Obat. Pada bulan Juni 2025, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengonfirmasi angka kematian jemaah haji menjadi salah satu indikator penting evaluasi operasional haji tiap tahun dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

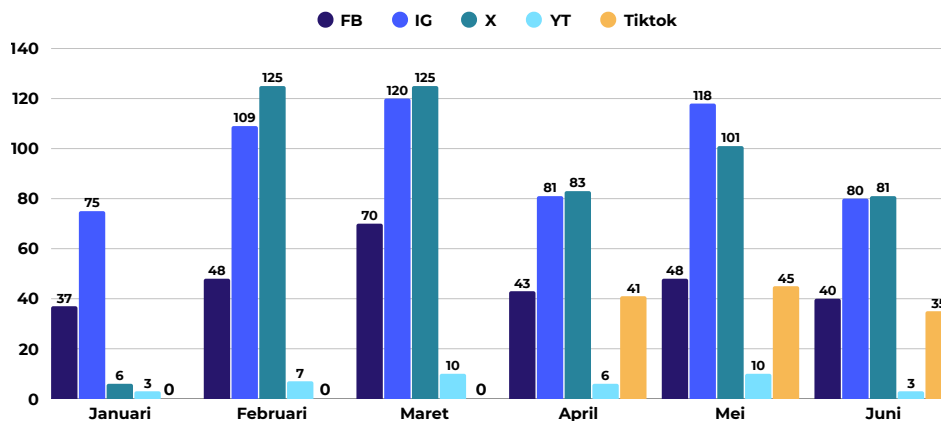
Berdasarkan jenis media, pemberitaan terkait Obat dan Makanan serta Badan POM hampir seluruhnya berasal dari media online sebesar 93,94% (16.748 berita), sedangkan media cetak sebesar 4,37% (779 berita) dan media elektronik sebesar 1,69% (302 berita).



Gambar 15. Sebaran Media Pemberitaan Isu Obat dan Makanan
s.d. Triwulan II Tahun 2025

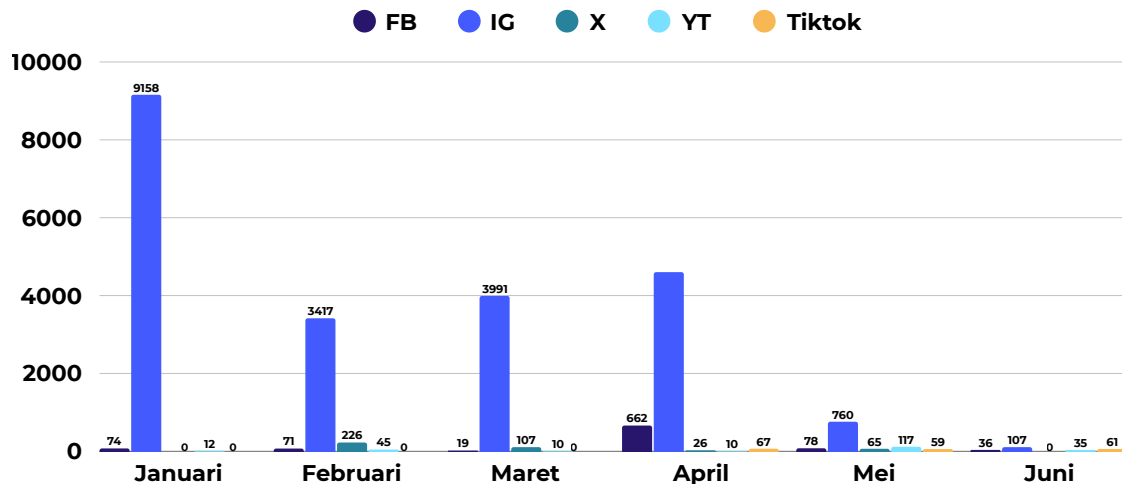
Pada triwulan II 2025, Badan POM resmi hadir pada platform TikTok untuk memperkuat komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat terutama ke generasi muda. Kehadiran Badan POM di TikTok menjadi langkah strategis untuk menyampaikan pesan dan informasi pengawasan obat dan makanan secara kreatif dan tepat sasaran. Aktivitas media sosial Badan POM pada 5 platform media sosial yaitu Facebook, Instagram, X atau Twitter, Youtube dan TikTok memiliki rata-rata 1-2 unggahan per hari. Platform Instagram merupakan platform dengan aktivitas tertinggi yaitu sebanyak 279 unggahan dibandingkan dengan 4 platform media sosial lainnya. Aktivitas tertinggi kedua adalah X dengan 265 unggahan, menyusul Facebook sebanyak 131 unggahan, TikTok dengan 265 unggahan serta Youtube sebanyak 19 unggahan.

Secara garis besar, total unggahan selama triwulan II pada berbagai platform adalah 1.609 konten, dengan rincian unggahan sampai dengan triwulan II di berbagai platform sebagai berikut:



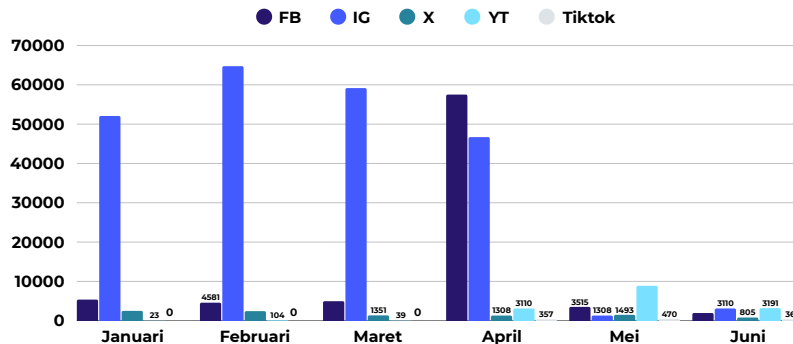
Gambar 16. Total Unggahan Media Sosial Badan POM Berdasarkan Platform s.d Triwulan II Tahun 2025

Sementara itu, pertumbuhan audiens/khalayak/pengunjung pada triwulan II terhadap 5 platform media sosial terpantau fluktuatif. Instagram merupakan platform dengan total audiens tertinggi pada triwulan II ini dengan jumlah 16.566 audiens, sementara di peringkat kedua platform X atau Twitter dengan jumlah 333 audiens, dilanjutkan dengan Facebook dengan jumlah 164 audiens, dan Youtube dengan 67 audiens. Pertumbuhan audiens tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu 9.244 audiens, disusul bulan Maret sebanyak 4.127 audiens dan bulan Februari sebanyak 3.759 audiens.



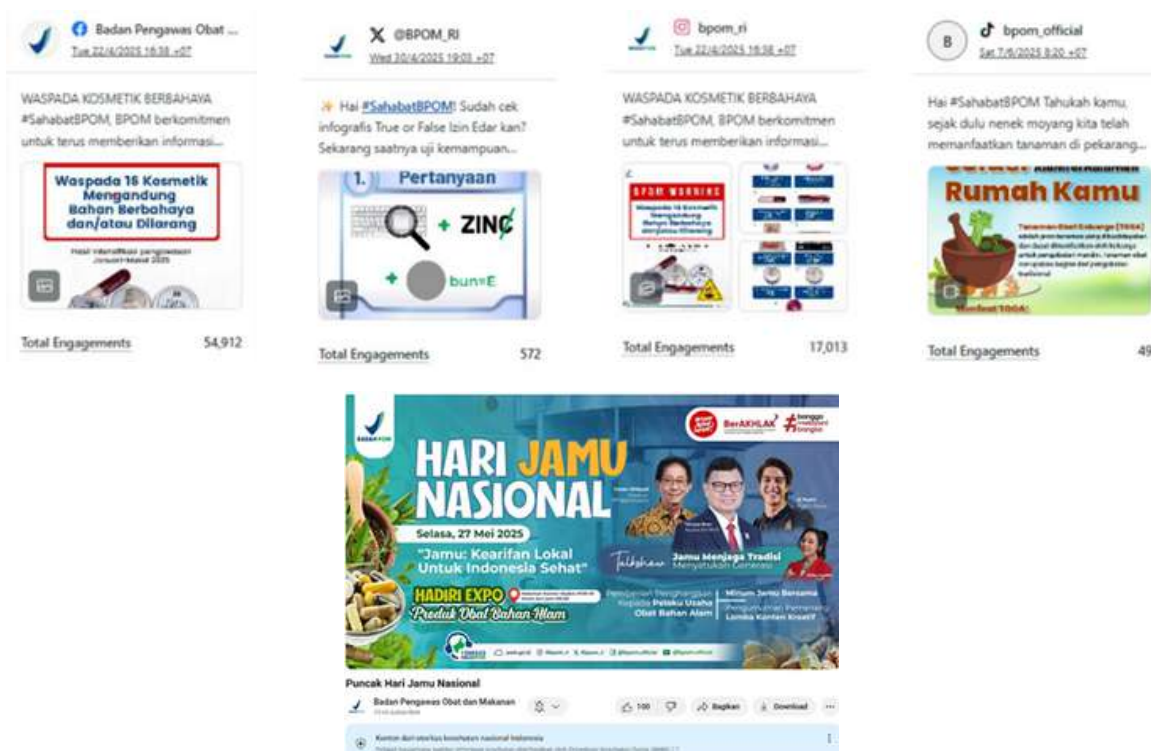
Gambar 17. Pertumbuhan Audiens Berdasarkan Platform s.d Triwulan II Tahun 2025

Pada triwulan II, engagement pada setiap platform cenderung fluktuatif. Engagement tertinggi terjadi pada bulan April dengan jumlah 108.994, diikuti bulan Juni sejumlah 24.756, dan bulan Mei sebesar 8.876. Pertumbuhan jumlah engagement sampai dengan triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:



Gambar 18. Engagement Per Platform s.d Triwulan II Tahun 2025

Top engagement content terkait Badan POM di keempat platform pada triwulan II dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 19. Top Engagement Content terkait Badan POM pada Platform Facebook, X, Instagram dan Youtube s.d Triwulan II Tahun 2025

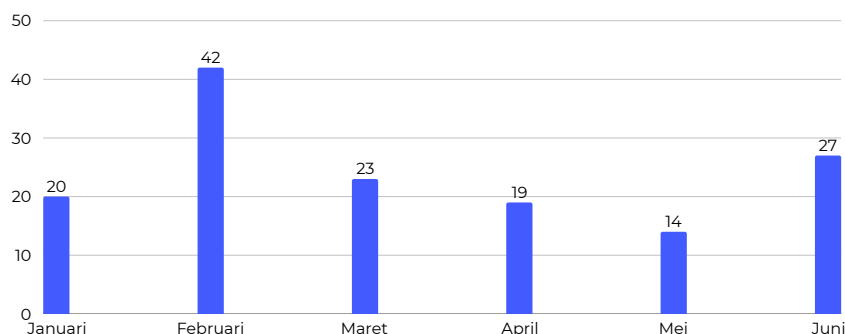
Pada triwulan II tahun 2025, Badan POM telah menerbitkan Majalah POM (MaPOM) Vol.7/No.1/2025 dengan mengusung tema utama Keamanan Pangan untuk Semua. Tema ini dipilih untuk mengajak pembaca menyelami berbagai upaya dan strategi dalam mewujudkan “Keamanan Pangan untuk Semua” sebagai sebuah visi yang inklusif dan strategis demi melindungi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam rangka memperkuat edukasi dan literasi masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat, Badan POM telah melaksanakan 126 kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) selama triwulan II 2025 dalam bentuk pameran dan penayangan materi KIE melalui e-kiosk, *whatsapp blast*, media sosial, video edukasi, dan *subsite* ULPK Badan POM.



Gambar 20. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan s.d Triwulan II Tahun 2025

Sampai dengan triwulan II tahun 2025, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Badan POM telah menerima 145 permintaan informasi dari pemohon informasi publik. Profil pemohon informasi berdasarkan profesi yaitu pelajar/mahasiswa (82,07%), PNS/TNI/POLRI (9,65%), karyawan (3,45%), masyarakat umum lainnya (1,38%), apoteker (1,38%), wartawan (0,69%), pelaku usaha (0,69%), dan sarjana hukum (0,69%).

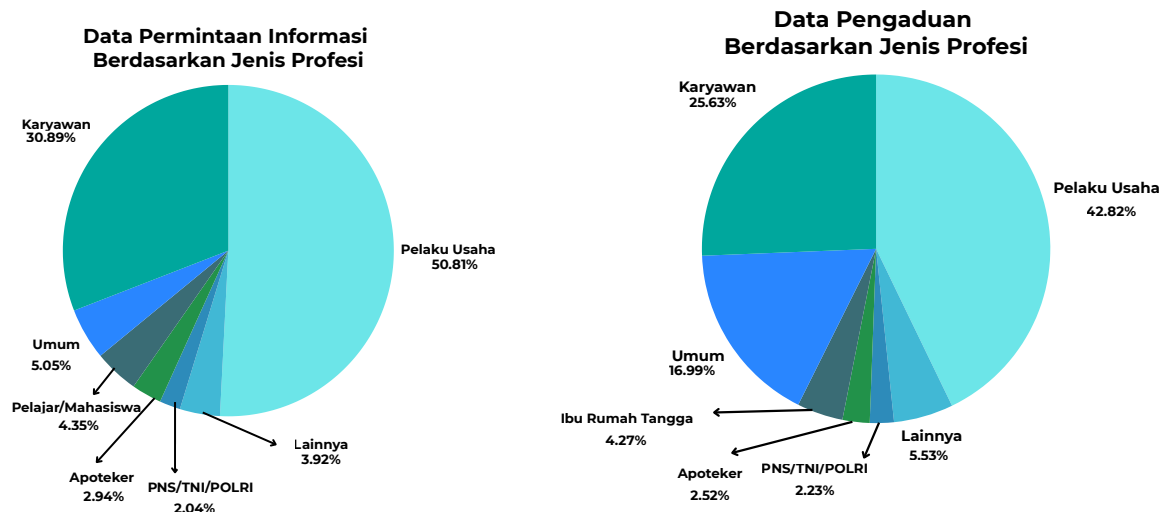


Gambar 21. Jumlah Permintaan Informasi Publik s.d. Triwulan II Tahun 2025

Dari 145 permintaan informasi publik yang diterima oleh Badan POM, sebanyak 129 (88,97%) permintaan informasi dikabulkan sepenuhnya, 11 (7,59%) permintaan informasi dikabulkan sebagian, dan 5 (3,44%) permintaan informasi ditolak. Permintaan informasi yang dikabulkan sebagian dan ditolak karena terdapat informasi yang tidak dikuasai dan termasuk ke dalam Klafifikasi Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Seluruh permintaan informasi dapat diselesaikan sesuai jangka waktu penyelesaian yaitu tidak lebih dari 17 hari kerja dengan rata-rata waktu penyelesaian adalah 3,76 hari kerja.

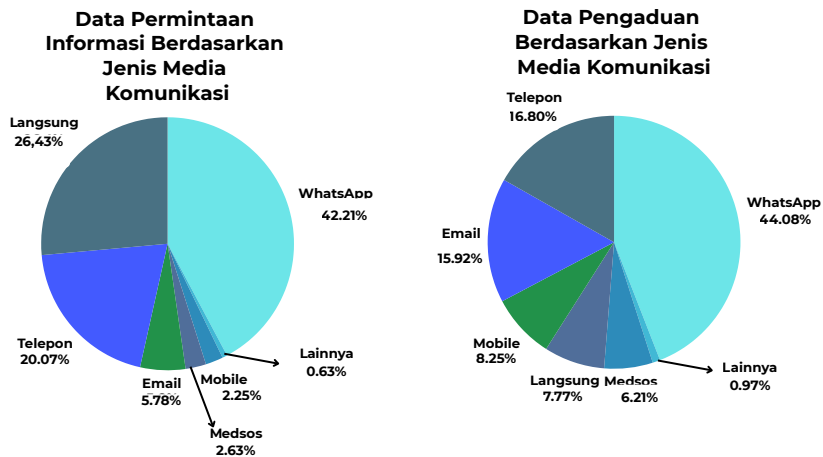
Berdasarkan data layanan informasi dan pengaduan masyarakat Obat dan Makanan sampai dengan triwulan II tahun 2025, Badan POM telah melaksanakan layanan informasi dan pengaduan masyarakat melalui ULPK Pusat dan 76 UPT di seluruh Indonesia serta Contact Center HALOBPOM sebanyak 26.414 layanan, terdiri dari 25.384 (96,10%) layanan permintaan informasi dan 1.030 (3,90%) layanan pengaduan.

Profil profesi masyarakat yang mengakses layanan informasi sebagian besar berasal dari pelaku usaha sebanyak 12.898 (50,81%) layanan dan karyawan sebanyak 7.841 (30,89%) layanan. Adapun pengaduan sebagian besar dari pelaku usaha sebanyak 441 (42,82%) layanan dan karyawan sebanyak 264 (25,63%) layanan.



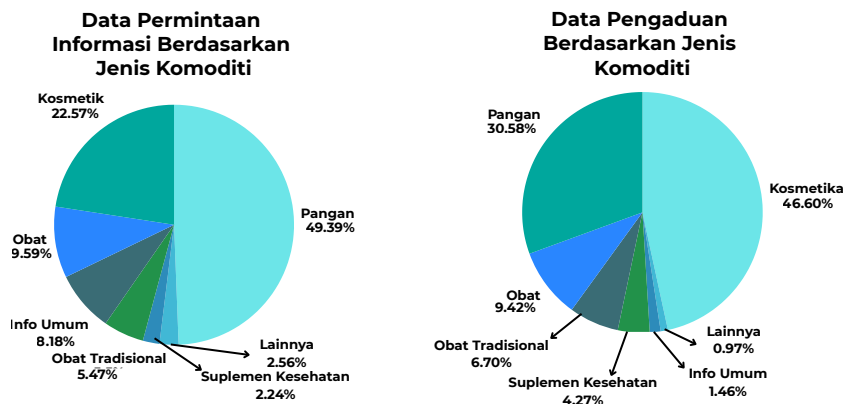
Gambar 22. Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM Berdasarkan Profesi

Media komunikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam mengakses layanan informasi yaitu melalui aplikasi Whatsapp sebanyak 10.718 (42,21%) layanan dan datang langsung (tatap muka) sebanyak 6.713 (26,43%) layanan. Adapun media yang paling banyak digunakan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan yaitu melalui Whatsapp sebanyak 454 (44,08%) layanan dan telepon sebanyak 173 (16,80%) layanan.



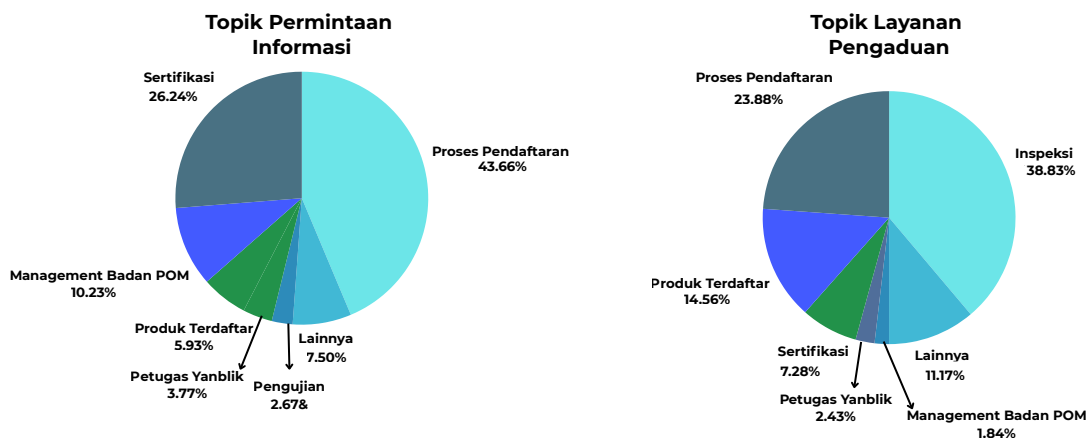
Gambar 23. Profil Media Permintaan Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM

Berdasarkan komoditi, informasi yang banyak ditanyakan masyarakat yaitu terkait pangan sebanyak 12.544 (49,39%) layanan dan kosmetika sebanyak 5.732 (22,57%). Adapun komoditi yang banyak diadukan yaitu kosmetik sebanyak 480 (46,60%) layanan dan pangan sebanyak 315 (30,58%) layanan.



Gambar 24. Profil Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan oleh Badan POM Berdasarkan Komoditi

Topik informasi yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat yaitu terkait proses pendaftaran sebanyak 11.082 (43,66%) layanan dan sertifikasi sebanyak 6.660 (26,24%) layanan. Topik lain yang sering ditanyakan antara lain informasi tentang informasi magang/penelitian oleh mahasiswa, penerimaan ASN di Badan POM, informasi prosedur kunjungan, informasi nomor kontak unit teknis di Badan POM, pengujian laboratorium, peraturan terkait pengawasan Obat dan Makanan, informasi legalitas produk, konsultasi desain kemasan produk, Informasi Nilai Gizi, dan tanggal kedaluwarsa. Adapun topik pengaduan yang banyak diajukan yaitu tentang inspeksi seperti pengaduan terkait peredaran produk obat dan makanan tanpa izin edar (TIE) atau tidak memenuhi syarat (TMS), baik secara online maupun offline, yaitu sebanyak 400 (38,83%) layanan, dan konfirmasi penyampaian perbaikan sebesar 246 (23,88%) layanan.



Gambar 25. Topik Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan atau Ditanyakan kepada Badan POM

The background is a solid dark blue. In the top-left corner, there are abstract geometric shapes in green and purple. In the center, there is a faint, light blue illustration of a caduceus (a staff with a snake entwined around it) and a pair of surgical forceps. A white rectangular box with rounded corners and a green drop shadow is positioned in the center, containing the text 'BAB 7'. At the bottom-left, there is a grid of small blue dots. At the bottom-right, there is a blue trapezoidal shape pointing to the right.

BAB 7

BAB 7

Digitalisasi Pelayanan Publik

a. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan POM

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Badan POM merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada triwulan II 2025, Badan POM terus memperkuat implementasi SPBE melalui berbagai langkah strategis antara lain diskusi teknis, dan koordinasi antar unit kerja. Upaya ini difokuskan pada pengembangan kapasitas SDM, penyusunan dan reviu kebijakan internal, serta penguatan kesiapan sistem dan layanan digital.

Untuk mendukung peningkatan kompetensi ASN di bidang SPBE, Badan POM mengadakan rangkaian rapat pembahasan modul pembelajaran yang mencakup kompetensi umum lanjutan, aplikasi teknologi informasi dan enterprise, infrastruktur, keamanan, hingga pengelolaan data. Tujuannya adalah menyusun materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan aktual dan tantangan implementasi SPBE di lingkungan kerja.

Dari sisi kebijakan dan penguatan standar layanan digital, dilakukan reviu terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan serta pembahasan dan penetapan kebijakan yang telah disusun. Selain itu, dalam proses evaluasi SPBE juga dilakukan implementasi Peta Rencana terhadap pengembangan aplikasi SPBE sebagai bagian dari proses pengukuran kinerja layanan digital yang telah dikembangkan.

Pendekatan implementasi SPBE di Badan POM tidak hanya berfokus pada pengembangan sistem dan aplikasi, tetapi juga menekankan aspek tata kelola, penguatan SDM, dan pembentukan budaya kerja digital. Strategi menyeluruh ini diharapkan mampu mempercepat transformasi digital yang berkelanjutan serta meningkatkan nilai indeks SPBE Badan POM.

b. BPOM Mobile

BPOM Mobile merupakan bentuk inovasi dalam strategi komunikasi Badan POM yang akan bermanfaat dalam menunjang peran dan fungsi Badan POM, masyarakat dan stakeholder dalam kebersamaan membangun kehidupan bangsa. BPOM Mobile juga merupakan salah satu bentuk dukungan implementasi digitalisasi atau e-government yang bermanfaat dalam peningkatan aksesibilitas yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari Badan POM. Berdasarkan data aktivitas BPOM Mobile dari tahun 2018 hingga triwulan II 2025, aplikasi ini telah diunduh oleh 2.762.220 pengguna dengan total aktivitas pemindaian atau pemakaian fitur scan 2D Barcode mencapai 26.277.439 kali serta menerima 12.411 laporan pengaduan atau permintaan informasi dari masyarakat.

BPOM Mobile telah memperbarui aplikasi dengan menambahkan beberapa menu baru, yaitu Info Alur Registrasi Produk, Info BPOM di Indonesia, PPID BPOM, dan JDIH BPOM. Selain penambahan menu baru, terdapat pembaruan fitur notifikasi, penambahan survei setelah mengakses e-labeling, dan pengaduan efek samping untuk akun tenaga kesehatan.

C. Layanan Data Terbuka

Layanan data terbuka merupakan kegiatan penyajian data dan informasi, salah satunya adalah Badan POM Command Center (BCC). BCC menyajikan visualisasi data dan informasi untuk kebutuhan pimpinan dalam mendukung pembuatan kebijakan dengan memberikan kemudahan melakukan monitoring dan evaluasi pada seluruh proses bisnis di Badan POM secara komprehensif dan real time dalam bentuk dashboard. Data dan informasi yang disajikan berasal dari unit kerja di BPOM yang kemudian diolah dan divisualisasi sesuai kebutuhan organisasi.

Sebagai upaya tindak lanjut dari Workshop Gotong Royong Data (WGRD) Tahun 2025 yang merupakan rangkaian pertemuan kolaboratif antara para pemangku kepentingan Satu Data Indonesia (SDI) dengan Kementerian dan Lembaga, Badan POM melakukan pembahasan usulan data prioritas Badan POM tahun 2025 yang dilaksanakan pada bulan Juni 2025. Dari hasil pembahasan disepakati bahwa data prioritas meliputi indikator-indikator strategis Badan POM dengan sumber data utama berasal dari sistem internal Badan POM.

Dalam mendukung prinsip SPLP, upaya integrasi aliran data dari berbagai unit dan sumber di Badan POM diarahkan agar seluruh proses pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data prioritas dapat berjalan secara terstandar, terbuka, dan akuntabel, serta memudahkan pemutakhiran maupun interoperabilitas data di tingkat pusat dan daerah. Proses ini melibatkan konfirmasi dan koordinasi antar unit, penggabungan data dari beberapa sistem, serta penguatan klasifikasi dan keamanan data sesuai dengan kebutuhan monitoring dan pengawasan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan implementasi SPLP dalam pengelolaan data prioritas BPOM dapat semakin optimal, sehingga mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia yang handal dan mampu memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan di lingkungan BPOM secara efektif dan berkelanjutan.

d. Penyelenggaraan Pendaftaran Sistem Elektronik

Dalam rangka melaksanakan amanat SPBE salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada awal tahun anggaran baru adalah pelaksanaan clearance EGA SPBE yang dilaksanakan oleh setiap instansi sebelum melakukan pekerjaan atau pengadaan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pada proses clearance EGA SPBE tahun 2025 ditetapkan persyaratan tambahan bahwa seluruh sistem elektronik yang diajukan wajib didaftarkan pada layanan Pendaftaran Sistem Elektronik yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

Proses pendaftaran ini wajib dilakukan oleh setiap pengelola sistem elektronik, oleh karena itu perlu dilakukan pendaftaran pejabat dan sub pejabat untuk mendapatkan akses pada <https://pse.layanan.go.id/login>. Pendaftaran sub pejabat sistem elektronik BPOM dilaksanakan melalui 2 tahap dengan total 26 unit kerja.

e. Pemenuhan Standarisasi Sistem Informasi

Standar Sistem Informasi (SSI) merupakan pedoman utama bagi seluruh unit kerja dan pengembang sistem di lingkungan Badan POM. Standar ini mengatur seluruh proses pembangunan sistem, dari pengajuan awal hingga pemeliharaan pasca-implementasi. Dasar hukum pedoman adalah Keputusan Kepala Badan POM Nomor 445 Tahun 2023 dan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2024.

Sampai dengan triwulan II tahun 2025, terdapat 36 usulan pengembangan aplikasi yang sudah diterima oleh Pusdatin.

Seluruh inisiasi proyek pengembangan aplikasi yang diterima akan dilakukan analisis dan kajian kesesuaian antara spesifikasi pengembangan yang diajukan dengan Peta Rencana Badan POM. Hal ini untuk memastikan bahwa pengembangan aplikasi BPOM telah sejalan dengan Peta Rencana SPBE yang disusun untuk dapat menghasilkan layanan yang terpadu.

f. Pelaksanaan Vulnerability Assessment (VA)

Vulnerability Assessment (VA) atau uji kerentanan adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi kelemahan (vulnerability) dalam sistem, aplikasi, jaringan atau infrastruktur teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk merusak, mencuri atau mengganggu sistem. Dasar pelaksanaan uji kerentanan yaitu Peraturan BSSN Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber.

Tujuan melakukan uji kerentanan sebagai langkah awal menjaga aset sistem informasi dan memberikan peringatan keamanan siber. Sampai dengan triwulan II 2025, telah dilaksanakan uji kerentanan terhadap 13 aplikasi internal Badan POM.

The background is a solid dark blue. In the top-left corner, there are abstract geometric shapes in green and purple. In the center, there is a faint, light blue illustration of a caduceus (a staff with a snake entwined around it) and a pair of surgical forceps. A white rectangular box with rounded corners and a green drop shadow is positioned in the center, containing the text 'BAB 8'. At the bottom-left, there is a grid of small white dots. At the bottom-right, there is a blue trapezoidal shape pointing to the right.

BAB 8

BAB 8

Perkuatan Peraturan Perundang-Undangan Pengawasan Obat dan Makanan

a. Penyusunan Regulasi

Sampai dengan triwulan II tahun 2025, telah ditetapkan 21 Peraturan Badan POM, 29 Keputusan/Surat Edaran Kepala Badan POM, dan 56 Rumusan Perjanjian.

Judul Peraturan Badan POM

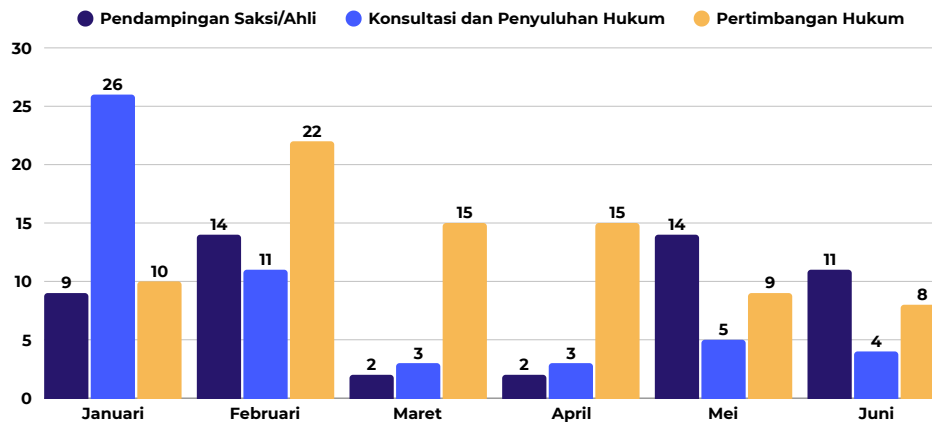
1. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2025
2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Sertifikasi Pelulusan Batch/Lot Vaksin
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pelatihan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Uji Stabilitas Suplemen Kesehatan
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Penilaian Produk Terapi Advanced
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Kajian Risiko Keamanan dan/atau Mutu Obat dan Bahan Obat

10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Verifikasi Metode Analisis Obat dan Bahan Obat
11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik di Unit Pengelola Darah dan Bank Plasma
12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan
13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
14. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Persyaratan Pangan Olahan Berasam Rendah Dikemas Hermetis
15. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
16. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Melalui Peran Serta Masyarakat
17. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Penilaian Produk Suplemen Kesehatan Mengandung Probiotik
18. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penagwasan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik
19. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Bahan Obat Narkotika Psikotropika Prekursor dan Zat Adiktif
20. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Standar Cara Distribusi Obat yang Baik
21. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pencabutan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

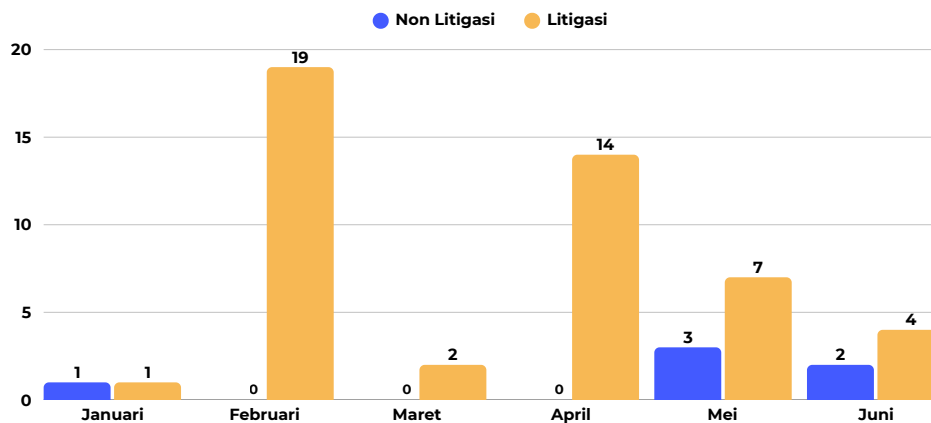
b. Layanan Advokasi Hukum

Setiap instansi pemerintah perlu mempertimbangkan aspek hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya agar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan implikasi hukum yang berisiko bagi organisasi.

Salah satu aspek hukum adalah layanan advokasi hukum yang terdiri dari pelaksanaan pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara hukum, pelaksanaan pendampingan kepada saksi/ahli serta pelaksanaan konsultasi dan penyuluhan hukum. Jumlah dan jenis layanan advokasi hukum yang sudah dilakukan oleh Badan POM sampai dengan triwulan II tahun 2025 yaitu 236 layanan yang terdiri dari 183 layanan advokasi hukum dan 53 layanan penanganan perkara.



Gambar 26. Layanan Advokasi Hukum Badan POM s.d. Triwulan II Tahun 2025



Gambar 27. Layanan Penanganan Perkara Badan POM s.d. Triwulan II Tahun 2025

The background is a solid dark blue. In the top-left corner, there are abstract geometric shapes in green and purple. In the center, there is a faint, light blue illustration of a caduceus (a staff with a snake entwined around it) and a microscope. A white rectangular box with rounded corners and a green drop shadow is positioned in the center, containing the text 'BAB 9'. At the bottom-left, there is a grid of small white dots. At the bottom-right, there is a blue trapezoidal shape pointing to the right.

BAB 9

BAB 9

Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

a. Penataan dan Penguatan Organisasi

Kelembagaan Badan POM diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM yang telah berlaku selama 7 tahun sehingga perlu direviu sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi agar mampu mengantisipasi tantangan dan beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Reviu Perpres Nomor 80 Tahun 2017 dilakukan melalui penyusunan Naskah Akademik Penataan Organisasi BPOM Tahun 2025 yang bertujuan untuk menganalisis dan memberikan rekomendasi kebijakan bagi penataan organisasi untuk mewujudkan organisasi BPOM yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran agar dapat adaptif dengan dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.

Selain pada tingkat organisasi induk, upaya penataan organisasi juga dilakukan terhadap UPT Badan POM di daerah melalui evaluasi klasifikasi terhadap 76 UPT menggunakan instrumen pada Peraturan Badan POM Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kriteria Klasifikasi UPT pada Badan POM. Seluruh data yang digunakan pada evaluasi klasifikasi UPT BPOM tahun 2025 bersumber dari Laporan Tahunan UPT Badan POM Tahun 2024. Penataan organisasi UPT juga dilakukan melalui potensi pembentukan Loka POM dengan mempertimbangkan keseimbangan beban kerja pengawasan obat dan makanan di daerah serta mendukung program prioritas pemerintah, yaitu makan bergizi gratis (MBG) dan pemberdayaan UMKM.

b. Pengelolaan Reformasi Birokrasi Badan POM

Badan POM telah menyusun Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Badan POM Tahun 2024. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan RB Badan POM sesuai Rencana Aksi yang telah disusun pada tahun 2024. Laporan Pelaksanaan RB Badan POM memberikan gambaran komprehensif atas capaian program serta rekomendasi untuk peningkatan kualitas RB Badan POM. Berdasarkan hasil evaluasi RB tahun 2024 oleh Kementerian PANRB, diperoleh Indeks RB Badan POM tahun 2024 sebesar 96,27 dengan

kategori “A-“ (Memuaskan dengan Catatan), mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 sebesar 89,12. Hal ini menunjukkan Badan POM telah memenuhi kriteria birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK.

c. Tinjau Ulang Dokumen SOP Makro Badan POM

Badan POM melakukan tinjau ulang terhadap kumpulan dokumen SOP Makro Pengawasan Obat dan Makanan untuk memastikan adanya perbaikan yang berkelanjutan dalam penerapan sistem manajemen pengawasan Obat dan Makanan. Proses pembahasan mengacu pada prinsip-prinsip penyusunan dan tinjau ulang SOP dan merujuk pada prinsip SERA, yaitu penyederhanaan proses (Simplification-S), penghilangan proses yang tidak perlu (Elimination-E), pembuatan proses yang sama sekali baru (Reengineering-R), dan pengautomatisasian (Automation-A). Sampai dengan triwulan II, terdapat 66 SOP Makro di lingkungan BPOM yang telah ditinjau ulang dan telah disahkan oleh Sekretaris Utama.

d. Sosialisasi dan Awareness Penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi

Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dibangun dari 11 klausul utama dengan integrasi berbagai standar ISO di antaranya ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu, ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, ISO 45001 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi, ISO/IEC 17025 Sistem Manajemen Kompetensi Laboratorium Pengujian dan lainnya. Struktur ini disusun berdasarkan prinsip integrasi proses, risiko, dan audit yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang utuh, akuntabel, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan pengawasan serta dinamika regulasi nasional. Sistem manajemen ini tidak berdiri sendiri, namun secara menyeluruh diintegrasikan dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Oleh karena itu, seluruh elemen sistem termasuk proses bisnis, dokumentasi, peran unit kerja, dan siklus audit, dikembangkan berdasarkan prinsip akuntabilitas, risiko, dan kepatuhan.

Kegiatan sosialisasi bukan sekadar pengenalan dokumen, tetapi momen konsolidasi budaya kerja baru di Badan POM yang mengedepankan efisiensi, akuntabilitas, partisipasi, dan mutu pelayanan publik. Salah satu isu strategis yang muncul adalah penataan three lines of defense, yakni

pelaksana (lini ke-1), manajemen pengendali (lini ke-2), dan pengawasan independen (lini ke-3). Saat ini Badan POM masih dalam masa transisi, di mana sebagian peran lini ke-2 masih dijalankan oleh Inspektorat Utama. Ke depan, fungsi pengendalian manajemen akan diposisikan lebih mandiri, sementara Inspektorat Utama akan fokus sebagai lini ke-3 yang independen dalam menilai maturitas dan efektivitas pengendalian intern.

Audit internal Badan POM dilaksanakan secara silang (cross-audit), berbasis risiko, dan dijalankan oleh auditor internal yang telah tersertifikasi. Hal ini menjadi bagian dari komitmen efisiensi dan integritas organisasi dalam menjamin penerapan sistem secara konsisten. Sejalan dengan arahan efisiensi anggaran dan pemangkasan prosedur yang tidak mendatangkan nilai tambah, Badan POM berencana mengembangkan sistem sertifikasi internal untuk menggantikan audit eksternal.

Masukan juga diberikan terkait pentingnya harmonisasi sistem manajemen dengan indikator dari berbagai lembaga seperti Kementerian PANRB, BPKP, ANRI, dan BSSN. Diharapkan sistem manajemen terintegrasi Badan POM dapat menjadi model yang menyatukan kebutuhan indikator suprasistem, mendorong efisiensi kerja birokrasi, dan tetap fokus pada pencapaian tujuan organisasi.

e. Pengembangan Pelayanan Publik

1. Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Rencana Aksi Survei Kepuasan Masyarakat Semester I 2025

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Badan POM Tahun 2024 dilaksanakan pada 97 Unit Pelayanan Publik (UPP) dengan rincian 21 unit kerja di lingkungan Badan POM Pusat, 42 Balai Besar/Balai POM, dan 34 Loka POM dengan total responden secara keseluruhan mencapai 8.658 pengguna layanan. Dari hasil SKM tersebut, masing-masing UPP diminta untuk menyusun rencana aksi tindak lanjut dari 3 unsur SKM dengan nilai terendah dengan mempertimbangkan saran/masukan responden. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi atas Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) hasil SKM tahun 2024, terdapat 389 RATL yang disusun dan 323 RATL (83,03%) telah selesai dilaksanakan.

2. Inventarisir Data Standar Layanan UPP Badan POM Tahun 2025

Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan publik yang prima, Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan Badan POM wajib menetapkan standar pelayanan yang menjadi acuan pelayanan publik pada masing-masing UPP. Badan POM telah melakukan inventarisasi data standar pelayanan pada setiap UPP dengan hasil seluruh UPP Badan POM sejumlah 97 UPP telah memiliki standar pelayanan. Hasil inventarisasi data standar pelayanan UPP Badan POM kemudian disampaikan kepada Kementerian PANRB melalui Surat Sekretaris Utama BPOM Nomor B-OT.03.04.2.05.25.323 tanggal 27 Mei 2025 hal Penyampaian Data Inventarisir Standar Pelayanan Pada UPP BPOM Tahun 2025.

The background features a faint, light blue illustration of a caduceus (a staff with two snakes entwined and wings at the top) and a microscope. The caduceus is positioned vertically, and the microscope is placed horizontally across its upper section. The entire scene is set against a dark blue background with abstract geometric shapes in green and purple in the top left corner and a grid of small blue dots in the bottom left corner.

BAB 10

BAB 10

Kerjasama Dalam Negeri dan Internasional

a. Badan POM Perkuat Posisi Indonesia dalam Regulasi Farmasi Regional Lewat Kunjungan Kerja ke Jepang

Kepala Badan POM melakukan kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang pada bulan April 2025 untuk memperkuat kerja sama regulatori dalam bidang farmasi dan produk kesehatan. Dalam rangkaian kegiatan ini, Kepala Badan POM menghadiri pertemuan bilateral dengan Health Sciences Authority (HSA) Singapura dan menjadi pembicara dalam forum regulator Asia, *The 7th Asian Network Meeting (ANM)*.

Pada pertemuan bilateral dengan Singapura, kedua pihak menyepakati penyusunan *Memorandum of Understanding (MoU)* guna memperkuat kerja sama di bidang penguatan kapasitas regulator, termasuk *reliance*, *joint assessment* (penilaian bersama), keamanan siber, hingga produk terapi lanjutan (ATMP). Dalam forum ANM, Kepala Badan POM menyampaikan pengalaman Indonesia dalam implementasi *reliance scheme*, pengembangan ekosistem uji klinik, serta peluang Indonesia sebagai pusat uji klinik multiregional di kawasan Asia. Kolaborasi ABG (*Academia-Business-Government*) di Indonesia juga disorot sebagai pendekatan unggulan dalam mempercepat pengembangan dan pengawasan produk inovatif.



Gambar 28. Peserta The 7th Asian Network Meeting yang Diselenggarakan di Tokyo, Jepang pada Tanggal 22-23 April 2025

Kepala Badan POM juga melakukan pertemuan strategis dengan *Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA)* Jepang guna melanjutkan kerja sama dalam kerangka MoU 2021 dengan fokus pada pengembangan kapasitas regulatori dan potensi pelatihan personel BPOM di PMDA. Melalui kunjungan ini, Badan POM memperkuat posisi Indonesia sebagai regulator regional yang adaptif dan kolaboratif, serta membuka peluang baru untuk modernisasi laboratorium dan penguatan kerja sama farmasi strategis dengan Jepang dan negara mitra Asia lainnya.

b. Kunjungan Kerja Kepala Badan POM ke Amerika Serikat

Kepala Badan POM Taruna Ikrar telah melaksanakan kunjungan kerja ke Amerika Serikat pada bulan Mei 2025 untuk menghadiri *2025 United States Pharmacopeia (USP) Convention Meeting* di Bethesda, Maryland. Kunjungan ini merupakan momentum strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam forum internasional terkait mutu obat dan membuka peluang kerja sama teknis yang lebih luas di bidang kefarmasian. Forum bergengsi ini dihadiri oleh lebih dari 500 pemimpin organisasi farmasi global dan menjadi ajang penting untuk memperkenalkan komitmen Indonesia dalam harmonisasi standar internasional.

Kepala Badan POM mendapat kehormatan menjadi salah satu pembicara utama pada sesi pleno dengan topik "*Challenges and Progress in Indonesia in Ensuring Access to Quality Medicines and Opportunities for Collaboration with United States Pharmacopeia*". Dalam paparannya, Kepala Badan POM menyoroti berbagai capaian Indonesia dalam memastikan ketersediaan obat yang bermutu, tantangan yang dihadapi, serta peluang kolaborasi yang dapat dikembangkan bersama USP. Partisipasi ini menunjukkan pengakuan internasional terhadap peran Indonesia dalam ekosistem farmasi global.

Pada kesempatan bersejarah ini, Kepala Badan POM Taruna Ikrar menandatangani Nota Kesepahaman strategis dengan USP. Penandatanganan ini menandai tonggak penting dalam upaya mempererat kerja sama teknis antara kedua lembaga dengan ruang lingkup kolaborasi yang luas dan berjangka panjang. MoU ini mencakup penyelenggaraan kegiatan ilmiah kolaboratif, penelitian bersama, pengembangan metode analisis terbaru, peningkatan kapasitas, pemberian akses kepada USP-NF terbaru, dan dukungan pengembangan sistem laboratorium

Badan POM menyampaikan harapan bahwa kerja sama strategis dengan USP dapat memperkuat kapasitas nasional dalam menjamin mutu obat dan pangan olahan, mempercepat adopsi teknologi pengujian modern, serta meningkatkan peran Indonesia dalam komunitas regulatori internasional.



Gambar 29. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan POM dengan *United States Pharmacopeia* di Maryland, Amerika Serikat

c. Badan POM Gandeng PBNU Berdayakan Pesantren

Badan POM dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pemberdayaan Pesantren di Bidang Obat dan Makanan. Kepala Badan POM Taruna Ikrar dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf secara resmi merilis kerja sama tersebut di Gedung PBNU, Jakarta pada tanggal 14 Mei 2025. Kolaborasi ini sangat penting mengingat pesantren sebagai salah satu komunitas masyarakat terbesar telah memiliki sejumlah badan usaha yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan.



Gambar 30. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan POM dengan PBNU di Jakarta pada Tanggal 14 Mei 2025

Kepala Badan POM menyatakan komitmen untuk terus mendukung keberpihakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di pondok pesantren. Bahkan Badan POM telah menginisiasi program kewirausahaan obat dan makanan di kalangan pesantren. Pihaknya menggarisbawahi pentingnya bangsa ini memiliki kekuatan spesifik secara ekonomi. Sementara itu, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan momentum penandatanganan nota kesepahaman ini tepat mengingat kondisi ekonomi global saat ini. “Warga NU jelas sangat membutuhkan sentuhan kebijakan untuk dapat menguatkan UMKM di lingkungan warga NU. Kehadiran Badan POM untuk mendampingi UMKM kita sangat dibutuhkan. Terima kasih kepada Badan POM atas kerja samanya,” ungkapnya.

Sebelum adanya nota kesepahaman ini, kerja sama antara Badan POM dan PBNU telah terjalin sangat erat dan harmonis. Salah satu bentuk kerja sama adalah *pilot project* sinergi pemberdayaan pesantren di bidang obat dan makanan. Melalui pendampingan yang baik, pesantren dapat menjadi penggerak dalam menyediakan produk yang aman, berkhasiat, dan bermutu sehingga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren sekaligus meningkatkan literasi keamanan pangan di masyarakat

d. Penguatan Kapasitas Regulasi dan Inovasi Vaksin Melalui Kemitraan BPOM-Gates Foundation

Pada bulan Mei 2025, Badan POM menerima kunjungan tim Gates Foundation untuk membahas pelaksanaan uji klinik fase 3 vaksin Tuberkulosis (M72/AS01E-4) di Indonesia. Kepala Badan POM Taruna Ikrar menyampaikan bahwa BPOM telah memberikan persetujuan atas pelaksanaan uji klinik tersebut setelah melalui evaluasi ilmiah oleh Komite Nasional Penilai Obat. Uji klinik ini bersifat multinasional dan multisentris, melibatkan 7 negara dengan total 20.000 subjek, termasuk 2.095 subjek dari Indonesia. Kegiatan ini akan dilaksanakan di lima sentra uji klinik nasional yang telah melalui inspeksi BPOM untuk memastikan kesesuaian dengan standar Cara Uji Klinik yang Baik (CUKB).



Gambar 31. Kepala Badan POM Menerima Kunjungan Perwakilan Gates Foundation di Kantor Badan POM, Jakarta pada Tanggal 15 Mei 2025

Gates Foundation juga mengunjungi fasilitas laboratorium Badan POM dan menyampaikan apresiasi atas kemitraan strategis yang telah terjalin, termasuk kerja sama vaksin Polio (nOPV2) melalui Biofarma. Gates Foundation menyatakan komitmen untuk mendukung penguatan kapasitas regulatori BPOM, serta kolaborasi dalam pengembangan vaksin untuk kebutuhan global. Badan POM menekankan pentingnya dukungan untuk penguatan laboratorium pengujian, mengingat luasnya wilayah Indonesia dan tantangan penelitian berbasis bukti. Konsep kolaborasi *academic-business-government* juga disampaikan sebagai pendekatan BPOM untuk mendorong inovasi obat dan vaksin ke depan.

e. Komitmen Badan POM dalam Melindungi Kesehatan dan Memperkuat Ekonomi Nasional

Kepala Badan POM Taruna Ikrar bersama Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti menandatangani Nota Kesepahaman untuk mempererat sinergi dalam pengawasan obat dan makanan di kantor Badan POM pada tanggal 24 Juni 2025. Kolaborasi dua instansi anggota Komite Kebijakan Sektor Kesehatan ini bertujuan mengintegrasikan rencana, kebijakan, serta monitoring agar ketersediaan dan distribusi obat di Indonesia berjalan efisien dan transparan demi mendukung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berkualitas, berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif.



Gambar 32. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan POM dengan BPJS Kesehatan serta Sejumlah Asosiasi dan Organisasi Kemasyarakatan di Kantor Badan POM, Jakarta pada Tanggal 24 Juni 2025

BPOM tidak hanya memperkuat pengawasan lewat kerja sama dengan BPJS Kesehatan, tetapi juga menjalin hubungan strategis dengan sejumlah asosiasi dan organisasi kemasyarakatan, seperti Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Asosiasi Pengusaha Kecil Menengah Mikro Nusantara (APIMSA), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Organisasi Masyarakat Persaudaraan Muslimah (Ormas Salimah), dan Yayasan Bina Insani Gemilang Indonesia (BIG Indonesia). Fokus kerja sama ini adalah pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. Selain Direktur Utama BPJS Kesehatan dan Ketua Umum APIMSA, turut hadir dalam kegiatan ini Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat APDESI Asep Anwar Sadat.

Ketua Umum Pengurus Besar HMI Bagas Kurniawan, Ketua Umum Ormas Salimah Reny Anggrayni, dan Ketua BIG Indonesia Dwi Andayani. Selain itu, hadir para pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama di lingkungan BPOM, serta Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) BPOM Elfi Taruna Ikrar.

Kegiatan sinergi lintas lembaga ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi masyarakat melalui pengawasan ketat obat dan makanan dari hulu ke hilir, meningkatkan efisiensi dan transparansi distribusi produk kesehatan demi mewujudkan JKN yang inklusif, serta mendukung UMKM naik kelas dengan registrasi, sertifikasi, dan akses pasar yang lebih luas. Dengan kolaborasi dan pemberdayaan yang terintegrasi, Badan POM terus menjaga kesehatan publik sekaligus memperkuat tulang punggung ekonomi rakyat.

The background is a solid dark blue. In the top-left corner, there are abstract geometric shapes in green and purple. In the center, there is a faint, light blue illustration of a caduceus (a staff with a snake entwined around it) and a pair of surgical forceps. A white rectangular box with rounded corners and a green drop shadow is positioned in the center, containing the text 'BAB 11'. At the bottom-left, there is a grid of small blue dots. At the bottom-right, there is a blue trapezoidal shape pointing to the right.

BAB 11

BAB 11

Sumber Daya Manusia

Sampai dengan triwulan II tahun 2025, total pegawai di Badan POM sebanyak 6.370 pegawai dengan penempatan di Pusat sejumlah 2.316 (36,36%) pegawai dan di UPT sejumlah 4.054 (63,64%) pegawai. Demografi pegawai di Badan POM berdasarkan gender terdiri dari 1.872 orang (29,39%) laki-laki dan 4.498 orang (70,61 %) perempuan. Jika dilihat berdasarkan tipe kepegawaian, pegawai Badan POM terdiri dari 5.465 orang (85,79%) Fungsional, 740 orang (11,62%) Pelaksana, dan 165 orang (2,59%) Struktural.

The background is a solid dark blue. In the top-left corner, there are abstract geometric shapes in green and purple. In the center, there is a faint, light blue illustration of a caduceus (a staff with a snake entwined around it) and a pair of surgical forceps. A white rectangular box with rounded corners and a green drop shadow is positioned in the center, containing the text 'BAB 12'. At the bottom-left, there is a grid of small blue dots. At the bottom-right, there is a solid blue trapezoidal shape pointing to the right.

BAB 12

BAB 12

Realisasi Anggaran Sampai dengan Juni 2025

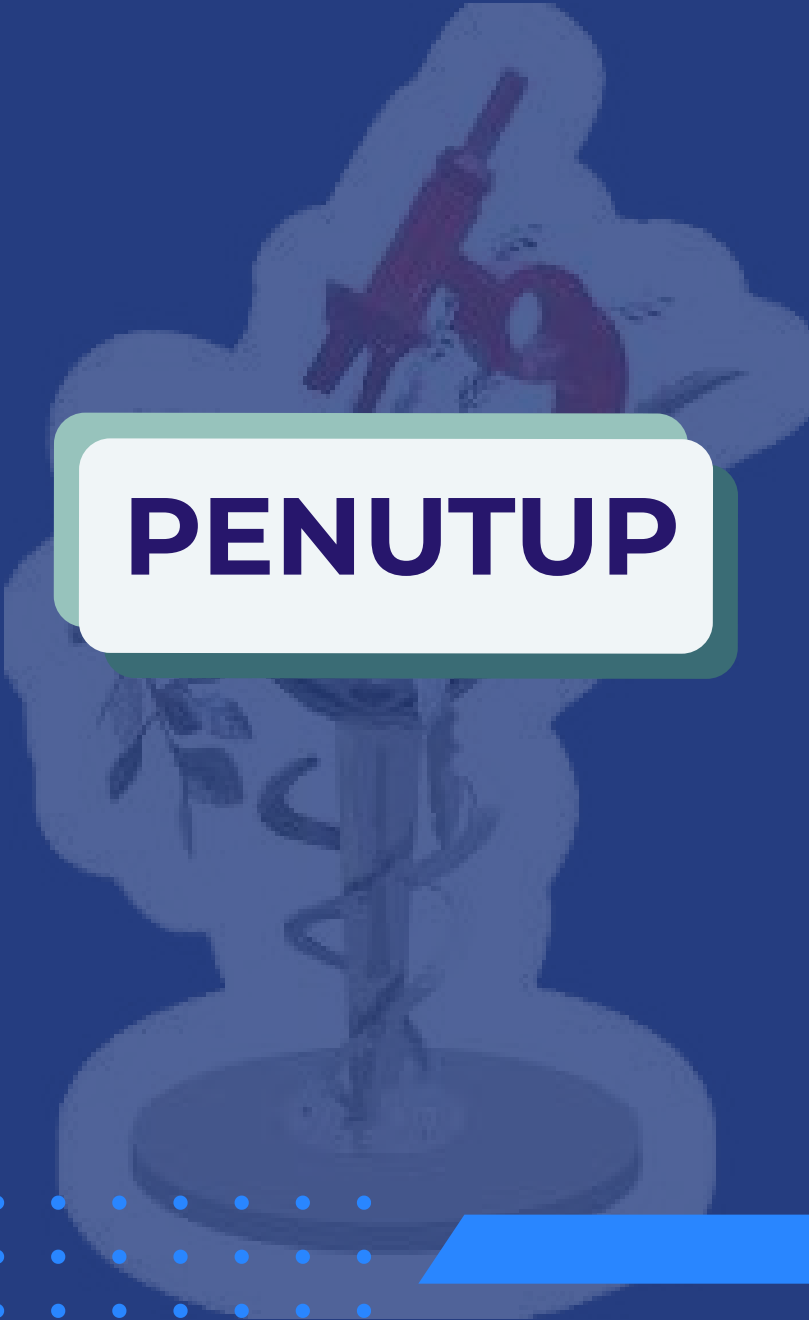
Total anggaran Badan POM Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.560.935.743.000,- untuk seluruh kegiatan di pusat maupun daerah. Anggaran yang terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Anggaran tersebut tersebar untuk 33 Satker Pusat, 53 Balai Besar/Balai POM dan 20 Loka POM. Realisasi anggaran per Juni tahun 2025 sebesar, Rp825.439.924.533,- (32,23%) yang terdiri dari realisasi anggaran untuk Satker Pusat Rp439.542.537.492,- realisasi anggaran untuk seluruh Balai Besar/Balai POM Rp359.703.732.758,- dan realisasi anggaran untuk Loka POM sebesar Rp26.193.654.283,-.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tedapat blokir anggaran BPOM sebesar Rp919.257.265.000,- sehingga pagu efektif yang dapat digunakan sebesar Rp1.641.678.478.000,-. Realisasi BPOM terhadap pagu efektif setelah blokir sebesar 50,28%

Tabel 3. Realisasi Anggaran s.d Juni 2025

Unit Kerja	Pagu	Realisasi	%
Pusat	1.145.888.698.000	439.542.537.492	38,36%
Balai Besar / Balai POM	1.304.662.733.000	359.703.732.758	27,57%
Loka Pom	110.384.312.000	26.193.654.283	23,73%
Total	2.560.935.743.000	825.439.924.533	32,23%

	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
Pagu	811.890.896.000	1.192.874.654.000	556.170.193.000	2.560.935.743.000
Realisasi	483.990.678.809	231.911.094.618	109.538.151.106	825.439.924.533
%	59,61%	19,38%	19,83%	32,23%

The background features a large, light blue, stylized illustration of a hand holding a syringe. Below the hand, a caduceus is visible. The entire scene is set against a dark blue background with geometric shapes in green and purple in the top left corner. A white rectangular box with rounded corners and a green border is centered over the illustration.

PENUTUP

PENUTUP

Kinerja yang ditampilkan dalam laporan ini merupakan sebagian dari keseluruhan kinerja BPOM. Meskipun demikian, diharapkan para pemangku kepentingan dapat memperoleh gambaran yang jelas bahwa program dan kegiatan BPOM berorientasi pada pencapaian tujuan utama tahun 2025, yaitu melindungi kesehatan masyarakat Indonesia melalui jaminan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BPOM akan terus berupaya meningkatkan kinerjanya di masa mendatang dengan menjunjung tinggi integritas, komitmen, keterbukaan, perencanaan yang menyeluruh (termasuk penganggaran), pelaksanaan yang terukur, evaluasi dan analisis hasil yang objektif, serta penerapan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).



LAMPIRAN 1

Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, BPOM secara rutin melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RKP BPOM Tahun 2025. Pemantauan ini mencakup perkembangan realisasi anggaran serta pencapaian sasaran kegiatan dan program, yang dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, pemantauan juga bertujuan untuk mengidentifikasi secara dini berbagai kendala yang dihadapi serta menetapkan upaya tindak lanjut yang diperlukan.

Pemantauan capaian RKP dilaksanakan secara bulanan. Adapun hasil pemantauan capaian RKP sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 disajikan dalam dokumen ini.

MATRIKS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
	BPOM	Indeks efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	50,98	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,40	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	82,50	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	88,20	Indeks	0,00	0,00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
	BPOM	Indeks Kualitas Kebijakan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	88,50	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Pelayanan Publik BPOM	4,35	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks RB BPOM	90,05	Indeks	0,00	0,00%
		Persentase inovasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dikawal sesuai standar	71,30	Persentase	0,00	0,00%
		Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	78,00	Persentase	90,40	115,90%
		Persentase pemenuhan Grand design penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	41,30	Persentase	7,00	16,95%
		Persentase PIRT yang aman dan bermutu	75,00	Persentase	84,13	112,17%
		Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu	72,50	Persentase	83,17	114,72%
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan	64,00	Persentase	1,56	2,44%
		Tingkat Kemandirian pelaku usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (produsen non UMKM)	34,75	Indeks	0,00	0,00%
A.	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang aman dan bermutu	90,00	Persentase	96,96	107,73%
		Persentase obat bahan alam yang aman dan bermutu	65,00	Persentase	65,73	101,12%
		Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	68,00	Persentase	83,25	122,43%
		Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	62,00	Persentase	73,71	118,89%
		Persentase PIRT yang aman dan bermutu	75,00	Persentase	84,13	112,17%
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	57,50	Persentase	56,60	98,43%
		Indeks Kualitas Kebijakan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	88,50	Indeks	0,00	0,00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	30,00	Persentase	0,00	0,00%
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83,00	Persentase	84,16	101,40%
		Persentase kabupaten/kota sadar Jamu Aman	2,00	Persentase	0,00	0,00%
		Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman	14,00	Persentase	0,00	0,00%
		Persentase pemenuhan Grand design penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	41,30	Persentase	7,00	16,95%
		Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang aman dan bermutu	90,60	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	86,87	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu	88,70	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	82,50	Indeks	0,00	0,00%
		Persentase pengawalan hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang dikawal sesuai standar	75,00	Persentase	67,92	90,56%
		Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	51,00	Persentase	45,15	88,53%
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos	60,00	Persentase	3,11	5,18%
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan	68,00	Persentase	0,00	0,00%
		Persentase industri farmasi yang meningkat level maturitasnya	52,00	Persentase	0,00	0,00%
		Persentase Industri Obat bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini	12,00	Persentase	0,00	0,00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh	56,00	Persentase	0,00	0,00%
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	19,00	Persentase	0,00	0,00%
		Persentase Keberhasilan Upaya Penegakan Hukum di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,00	Persentase	47,83	64,64%
		Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	75,00	Persentase	64,91	86,55%
		Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	4,70	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	4,70	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4,69	Indeks	0,00	0,00%
1.1	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,81	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Pelayanan Publik UPT	4,27	Indeks	0,00	0,00%
		Jumlah desa pangan aman	172	Desa	61,12% (Progress)	
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	73	Pasar	74,20% (Progress)	
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	490	Sekolah	63,27% (Progress)	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Nilai AKIP UPT BPOM	79,30	Nilai	0,00	0,00%
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	Nilai	0,00	0,00%
		Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	88,01	Nilai	5,60	6,37%
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	60,70	Nilai	39,12	64,44%
		Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	59,00	Persentase	59,14	100,23%
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,07	Persentase	97,82	105,11%
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00	Persentase	2,21	8,50%
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86,46	Persentase	98,37	113,77%
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100,00	Persentase	50,28	50,28%
		Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85,13	Persentase	44,25	51,98%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83,29	Persentase	71,37	85,69%
		Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	Persentase	50,16	55,73%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	100,00	Persentase	53,03	53,03%
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100,00	Persentase	31,94	31,94%
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78,62	Persentase	93,94	119,48%
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,91	Persentase	94,42	115,28%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83,22	Persentase	96,45	115,90%
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,63	Persentase	96,27	119,40%
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,72	Persentase	96,53	116,70%
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,62	Persentase	81,18	89,59%
		Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15,00	Persentase	60,29	401,93%
		Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,52	Nilai	88,62	102,43%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	100,00	Nilai	81,67	81,67%
1.2	Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Cegah Tangkal	3,01	Indeks	0,00	0,00%
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Cegah Tangkal	89,00	Nilai	0,00	0,00%
		Persentase Informasi Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Tervalidasi	91,00	Persentase	98,35	108,08%
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Cegah Tangkal Sesuai Standar	100,00	Persentase	55,00	55,00%
		Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal yang Ditindaklanjuti	62,00	Persentase	32,43	52,31%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal	100,00	Nilai	100,00	100,00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
1.3	Intelijen Obat dan Makanan	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	3,01	Indeks	0,00	0,00%
		Jumlah Profil Jaringan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang terpetakan	4,00	Profil	0,00	0,00%
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	85,00	Nilai	0,00	0,00%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Intelijen Obat dan Makanan sesuai standar	100,00	Persentase	55,00	55,00%
		Persentase Rekomendasi Intelijen yang Ditindaklanjuti	75,00	Persentase	71,43	95,24%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	100,00	Nilai	88,00	88,00%
1.4	Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	3,01	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks pelayanan publik (IPP) dit Pengawasan OT dan SK	4,70	Indeks	0,00	0,00%
		Jumlah pelaku usaha yang berkomitmen dalam pengembangan produk Fitofarmaka yang berdaya saing	9,00	Pelaku Usaha	0,00	0,00%
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	90,01	Nilai	0,00	0,00%
		Nilai tata kelola pengawasan sarana dan produk obat bahan alam oleh UPT	89,50	Nilai	79,73	89,08%
		Nilai tata kelola pengawasan sarana dan produk suplemen kesehatan oleh UPT	91,50	Nilai	81,12	88,66%
		Persentase Industri Ekstrak bahan alam (IEBA) yang menghasilkan bahan Baku OBA yang bermutu	11,00	Persentase	0,00	0,00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Persentase Industri Obat bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini	12,00	Persentase	0,00	0,00%
		Persentase keputusan hasil pengawasan iklan obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	98,50	Persentase	98,51	100,01%
		Persentase keputusan hasil pengawasan iklan suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	76,00	Persentase	83,06	109,29%
		Persentase keputusan hasil pengawasan produk obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	96,00	Persentase	99,68	103,83%
		Persentase keputusan hasil pengawasan produk suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	92,00	Persentase	98,65	107,23%
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	70,00	Persentase	100,00	142,86%
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	75,00	Persentase	100,00	133,33%
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	80,00	Persentase	75,00	93,75%
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	85,00	Persentase	100,00	117,65%
		Persentase Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	93,00	Persentase	93,12	100,13%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	100,00	Persentase	55,00	55,00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83,00	Persentase	84,08	101,30%
		Persentase UMKM OBA yang meningkat kapasitasnya untuk menghasilkan produk berdaya saing	60,00	Persentase	0,00	0,00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	100,00	Nilai	85,00	85,00%
1.5	Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	3,20	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	4,65	Indeks	0,00	0,00%
		Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan IRTP sesuai standar untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman	185,00	Kab/Kota	0,00	0,00%
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Rekomendasi Terhadap Pengawasan Sarana IRTP	2,00	Laporan	1,00	50,00%
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	91,82	Nilai	0,00	0,00%
		Persentase hasil pengawasan sarana produksi pangan olahan oleh UPT yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	69,00	Persentase	0,00	0,00%
		Persentase Keputusan hasil pengawasan produksi pangan olahan yang ditindaklanjuti sesuai standar	97,00	Persentase	100,00	103,09%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan sesuai standar	100,00	Persentase	55,00	55,00%
		Persentase sarana produksi pangan fortifikasi skala kecil yang meningkat kepatuhannya terhadap regulasi	11,00	Persentase	1,60	14,55%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Persentase sarana produksi pangan olahan risiko tinggi yang memenuhi ketentuan wajib Program Manajemen Risiko	75,00	Persentase	0,00	0,00%
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	19,00	Persentase	0,00	0,00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	100,00	Nilai	80,00	80,00%
1.6	Pengawasan Kosmetik	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Kosmetik	3,00	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks pelayanan publik (IPP) dit Pengawasan Kosmetik	4,70	Indeks	0,00	0,00%
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Kosmetik	92,19	Nilai	0,00	0,00%
		Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh	56,00	Persentase	0,00	0,00%
		Persentase keputusan hasil pengawasan iklan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	90,00	Persentase	100,00	111,11%
		Persentase keputusan hasil pengawasan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	90,00	Persentase	98,83	109,81%
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana dan produk kosmetik oleh UPT sesuai ketentuan	92,00	Persentase	92,01	100,01%
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	84,00	Persentase	92,11	109,65%
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	84,00	Persentase	93,33	111,11%
		Persentase keputusan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	94,20	Persentase	95,60	101,49%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Kosmetik	100,00	Persentase	55,00	55,00%
		Persentase pemenuhan ketentuan oleh BUPN kosmetik yang telah diintervensi	70,00	Persentase	0,00	0,00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83,85	Persentase	0,00	0,00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik	100,00	Nilai	80,00	80,00%
1.7	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat Narkotika Psikotropika dan Prekursor	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	3,60	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4,70	Indeks	0,00	0,00%
		Nilai Pembangunan ZI di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	93,37	Nilai	0,00	0,00%
		Persentase keputusan hasil pengawasan di bidang distribusi dan penyerahan obat yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	84,00	Persentase	0,00	0,00%
		Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi dan fasilitas penyerahan obat yang diselesaikan sesuai standar	96,00	Persentase	94,52	98,46%
		Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi dan penyerahan obat dan NPP oleh UPT sesuai ketentuan	88,00	Persentase	89,16	101,32%
		Persentase keputusan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu	96,50	Persentase	96,80	100,31%
		Persentase kesesuaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR	80,00	Persentase	0,00	0,00%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	100,00	Persentase	55,00	55,00%
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan distribusi obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	30,00	Persentase	0,00	0,00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	100,00	Nilai	95,00	95,00%
1.8	Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat Narkotika Psikotropika Prekursor dan Zat Adiktif	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor ONPPZA	3,83	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor ONPPZA	4,70	Indeks	0,00	0,00%
		Jumlah tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan	12,00	Tindak Lanjut	6,00	50,00%
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor ONPPZA	93,80	Nilai	0,00	0,00%
		Persentase hasil pengawasan keamanan, mutu, dan informasi Obat dan NAPPZA oleh UPT BPOM yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	85,00	Persentase	65,30	76,82%
		Persentase hasil pengawasan mutu ONPP yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	70,00	Persentase	94,59	135,13%
		Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Memenuhi Ketentuan	75,00	Persentase	79,00	105,33%
		Persentase laporan pengawasan iklan dan penandaan obat NPP yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	89,40	Persentase	84,29	94,28%
		Persentase materi KIE di bidang obat yang disusun dan disosialisasikan sesuai rencana aksi	100,00	Persentase	100,00	100,00%
		Persentase pelaku usaha produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang melaporkan informasi produk sesuai ketentuan	57,00	Persentase	0,00	0,00%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor ONPPZA	100,00	Persentase	55,00	55,00%
		Persentase permohonan persetujuan iklan obat yang diselesaikan tepat waktu	78,00	Persentase	88,03	112,86%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Persentase Surat Keterangan Impor Obat dan Bahan Obat serta Analisis Hasil Pengawasan Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor yang diselesaikan tepat waktu	94,00	Persentase	94,96	101,02%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor ONPPZA	100,00	Nilai	78,00	78,00%
1.9	Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	3,60	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4,70	Indeks	0,00	0,00%
		Jumlah Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman	170,00	Kab/Kota	0,00	0,00%
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Rekomendasi Terhadap Pengawasan PIRT	2,00	Laporan	1,00	50,00%
		Jumlah Sarana Peredaran yang Menerapkan SMKPO Peredaran	200,00	Sarana Peredaran	176,00	88,00%
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	86,75	Nilai	0,00	0,00%
		Persentase hasil pengawasan produk dan sarana peredaran pangan olahan oleh UPT yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	Persentase	0,00	0,00%
		Persentase Keputusan hasil pengawasan pangan olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan	99,88	Persentase	99,93	100,05%
		Persentase Keputusan hasil pengawasan sarana peredaran yang diselesaikan sesuai ketentuan	100,00	Persentase	100,00	100,00%
		Persentase KLB Keracunan Pangan yang teridentifikasi penyebabnya	75,00	Persentase	75,00	100,00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan sesuai standar	100,00	Persentase	55,00	55,00%
		Persentase Surat Keterangan Ekspor/Impor Pangan yang diselesaikan tepat waktu	93,00	Persentase	95,57	102,76%
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Iklan Pangan Olahan Sesuai Ketentuan	72,00	Persentase	72,58	100,81%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	100,00	Nilai	100,00	100,00%
1.10	Pengawasan Produksi Obat Narkotika Psikotropika dan Prekursor	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Produksi Obat & NPP	3,52	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4,70	Indeks	0,00	0,00%
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Produksi Obat & NPP	93,45	Nilai	0,00	0,00%
		Persentase Fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku yang diawasi sesuai standar	82,00	Persentase	34,43	41,99%
		Persentase industri farmasi yang meningkat level maturitasnya	52,00	Persentase	0,00	0,00%
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi Obat dan NPP oleh UPT sesuai ketentuan	85,00	Persentase	75,00	88,24%
		Persentase keputusan penilaian fasilitas produksi Bahan Baku Obat, obat, produk biologi, dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu	86,00	Persentase	85,71	99,66%
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Produksi Obat & NPP	100,00	Persentase	55,00	55,00%
		Persentase Penilaian Hasil Pengawasan Kemandirian UPT Baru	75,00	Persentase	0,00	0,00%
		Persentase sarana produksi obat JKN, bahan baku obat, dan obat high risk lainnya yang mematuhi persyaratan CPOB	78,00	Persentase	81,36	104,31%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Persentase tahapan pemenuhan fasilitas produksi obat dan bahan baku obat pengembangan baru yang diterbitkan keputusan dalam rangka pengawasan	84,00	Persentase	79,17	94,25%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Obat & NPP	100,00	Nilai	100,00	100,00%
1.11	Registrasi Pangan Olahan	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4,00	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Pelayanan Publik Registrasi Pangan Olahan	4,70	Indeks	0,00	0,00%
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Registrasi Pangan Olahan	96,60	Nilai	0,00	0,00%
		Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	79,00	Persentase	68,06	86,15%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Registrasi Pangan Olahan sesuai standar	100,00	Persentase	55,00	55,00%
		Persentase pendampingan di bidang registrasi pangan olahan yang efektif	100,00	Persentase	0,00	0,00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan	100,00	Nilai	100,00	100,00%
1.12	Registrasi Obat	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Registrasi Obat	3,00	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Registrasi Obat	4,70	Indeks	0,00	0,00%
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Registrasi Obat	91,50	Nilai	0,00	0,00%
		Persentase Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai ketentuan	75,00	Persentase	90,74	120,99%
		Persentase obat yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	75,00	Persentase	90,18	120,24%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Registrasi Obat sesuai standar	100,00	Persentase	55,00	55,00%
		Persentase pengawalan hilirisasi obat pengembangan baru melalui registrasi yang dikawal sesuai standar	70,00	Persentase	41,67	59,53%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Registrasi Obat	100,00	Nilai	75,00	75,00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
1.13	Registrasi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3,01	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4,70	Indeks	0,00	0,00%
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	91,50	Nilai	0,00	0,00%
		Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat bahan alam	90,00	Persentase	90,31	100,34%
		Persentase keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) yang diselesaikan sesuai standar	50,00	Persentase	38,43	76,86%
		Persentase kosmetik yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	94,00	Persentase	87,37	92,95%
		Persentase obat bahan alam yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	75,00	Persentase	66,74	88,99%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100,00	Persentase	55,00	55,00%
		Persentase pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, notifikasi kosmetik, penilaian uji praklinik/klinik OBA, SK, dan Kosmetik, serta penilaian DIP yang efektif	88,00	Persentase	93,46	106,20%
		Persentase peningkatan jumlah varian produk Jamu yang terdaftar	20,00	Persentase	9,13	45,65%
		Persentase peningkatan penelitian uji pra klinik dan uji klinik Jamu yang didampingi sesuai standar	18,00	Persentase	8,33	46,28%
		Persentase suplemen kesehatan yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	65,00	Persentase	59,17	91,03%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100,00	Nilai	100,00	100,00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
1.14	Standardisasi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	83,00	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	2,90	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4,70	Indeks	0,00	0,00%
		Jumlah Standar obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang disusun berkontribusi dalam penanganan stunting	1,00	Standar	0,00	0,00%
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	89,00	Nilai	0,00	0,00%
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	100,00	Persentase	55,00	55,00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	100,00	Nilai	100,00	100,00%
1.15	Standardisasi Pangan Olahan	Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	86,43	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	3,20	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	4,70	Indeks	0,00	0,00%
		Jumlah regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	1,00	Regulasi	0,00	0,00%
		Jumlah regulasi terkait pengaturan label produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi kesehatan	1,00	Regulasi	0,00	0,00%
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	90,08	Nilai	0,00	0,00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar	88,00	Persentase	40,00	45,45%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sesuai standar	100,00	Persentase	55,00	55,00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	100,00	Nilai	75,00	75,00%
1.16	Standardisasi Obat Narkotika Psikotropika Prekursor dan Zat Adiktif	Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	88,05	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Standardisasi Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	3,43	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Pelayanan Publik Direktorat Standardisasi ONPPZA	4,60	Indeks	0,00	0,00%
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	92,38	Nilai	0,00	0,00%
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	100,00	Persentase	55,00	55,00%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	100,00	Nilai	95,00	95,00%
1.17	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	3,60	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat PMPUPO	4,70	Indeks	0,00	0,00%
		Jumlah Kab/ Kota yang melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif	73,00	Kab/Kota	35,00	47,95%
		Jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan pengawasan pre-market IRTIP sesuai standar	28,00	Kab/Kota	3,00	10,71%
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	92,30	Nilai	0,00	0,00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Persentase Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	74,00	Persentase	22,00	29,73%
		Persentase Kader Keamanan Pangan Nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan	80,00	Persentase	10,18	12,73%
		Persentase pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat di bidang Pangan Olahan yang dilakukan oleh UPT sesuai pedoman	88,00	Persentase	0,00	0,00%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan sesuai standar	100,00	Persentase	55,00	55,00%
		Tingkat efektivitas KIE Pangan Olahan	86,42	Nilai	89,00	102,99%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	100,00	Nilai	80,00	80,00%
1.18	Pengujian Obat dan Makanan	Indeks Manajemen Risiko PPPOMN	3,15	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4,70	Indeks	0,00	0,00%
		Jumlah laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar	4,00	Laboratorium	0,00	0,00%
		Nilai AKIP PPPOMN	85,00	Nilai	0,00	0,00%
		Nilai Efektivitas implementasi regionalisasi laboratorium	77,00	Nilai	0,00	0,00%
		Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	5,00	Nilai	0,00	0,00%
		Nilai Pembangunan ZI PPOMN	91,59	Nilai	0,00	0,00%
		Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium	65,50	Nilai	65,94	100,67%
		Persentase implementasi digitalisasi laboratorium	30,00	Persentase	0,00	0,00%
		Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	80,91	Persentase	78,10	96,53%
		Persentase pemenuhan laboratorium hijau	40,00	Persentase	0,00	0,00%
		Persentase pemenuhan laboratorium terkoneksi dalam sesuatu jejaring secara terpadu	42,00	Persentase	20,00	47,62%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Presentase baku pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	80,04	Presentase	76,61	95,71%
1.19	Penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Penyidikan	2,80	Indeks	0,00	0,00%
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Penyidikan	87,44	Nilai	0,00	0,00%
		Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	59,00	Persentase	53,64	90,92%
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Penyidikan Sesuai Standar	100,00	Persentase	55,00	55,00%
		Persentase pendampingan UPT dalam proses penyidikan yang ditindaklanjuti	55,00	Persentase	31,58	57,42%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan	100,00	Nilai	75,00	75,00%
1.20	Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3,01	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	86,50	Indeks	0,00	0,00%
		Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	82,00	Nilai	0,00	0,00%
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	5,00	Nilai	0,00	0,00%
		Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dimanfaatkan	87,00	Persentase	0,00	0,00%
		Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis pimpinan	91,00	Persentase	93,53	102,78%
1.21	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT SK Kos	Indeks Manajemen Risiko Direktorat PMPU OT, SK, Kos	2,85	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Pelayanan Publik Direktorat PMPU OT,SK,Kos	4,70	Indeks	0,00	0,00%
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat PMPU OT, SK, Kos	87,10	Nilai	0,00	0,00%
		Persentase fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMKM OBA dan Kos	70,00	Persentase	21,43	30,61%
		Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Program Sadar Jamu Aman	2,00	Persentase	0,00	0,00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Persentase pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat di bidang OBA, SK, Kos yang dilakukan oleh UPT sesuai pedoman	65,00	Persentase	11,63	17,89%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat PMPU OT, SK, Kos	100,00	Persentase	55,00	55,00%
		Persentase Penyuluh/Kader/Duta OBA, SK dan Kos aman yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat	92,00	Persentase	15,00	16,30%
		Tingkat efektivitas KIE Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89,34	Nilai	89,36	100,02%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat PMPU OT, SK, Kos	100,00	Nilai	86,00	86,00%
1.22	Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Siber Obat dan Makanan	3,01	Indeks	0,00	0,00%
		Nilai Pembangunan Zona Integritas Direktorat Siber Obat dan Makanan	82,50	Nilai	0,00	0,00%
		Persentase Hasil Patroli Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti	82,00	Persentase	80,04	97,61%
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Siber Obat dan Makanan	100,00	Persentase	54,55	54,55%
		Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan	87,00	Persentase	90,88	104,46%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan	100,00	Nilai	75,00	75,00%
B.	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT SK Kos	Indeks Manajemen Risiko Sekretariat Utama	2,91	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Opini Publik	78,00	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Utama	4,70	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	34,60	Indeks	0,00	0,00%
		Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	5,00	Nilai	0,00	0,00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Nilai Pembangunan ZI Sekretariat Utama	86,62	Nilai	0,00	0,00%
		Nilai AKIP Sekretariat Utama	83,81	Nilai	0,00	0,00%
		Persentase Kerja Sama yang Efektif	90,50	Persentase	42,42	46,87%
		Persentase UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif	61,00	Persentase	20,93	34,31%
2.1	Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM	Indeks Kepuasan Media	78,40	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Manajemen Risiko Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	2,92	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Opini Publik	85,20	Indeks	0,00	0,00%
		Nilai Pembangunan ZI Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	81,00	Nilai	0,00	0,00%
		Persentase Kerja Sama Pembangunan dengan Regulator Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Negara Berkembang yang ditindaklanjuti	20,00	Persentase	0,00	0,00%
		Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,50	Persentase	41,69	46,07%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sesuai standar	100,00	Persentase	55,00	55,00%
		Persentase peran aktif BPOM dalam kerja sama Internasional di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	90,50	Persentase	43,15	47,68%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	100,00	Nilai	100,00	100,00%
2.2	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan Penyusunan Dokumen Anggaran Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	Indeks Manajemen Risiko Biro Perencanaan dan Keuangan	3,60	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Perencanaan Pembangunan	97,55	Indeks	0,00	0,00%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPOM komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja	61,70	Nilai	0,00	0,00%
		Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran BPOM	90,00	Nilai	0,00	0,00%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPOM	96,40	Nilai	0,00	0,00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Nilai Pembangunan Zona Integritas Biro Perencanaan dan Keuangan	88,32	Nilai	0,00	0,00%
		Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	4,00	Opini	0,00	0,00%
		Persentase dokumen manajemen risiko BPOM yang diselesaikan sesuai standar	100,00	Persentase	50,00	50,00%
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Pemerintah Daerah yang diselesaikan	100,00	Persentase	30,00	30,00%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai standar	100,00	Persentase	54,55	54,55%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	100,00	Nilai	100,00	100,00%
2.3	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Advokasi Hukum serta Organisasi dan tata laksana	Indeks Kepuasan Masyarakat BPOM	92,75	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Manajemen Risiko Biro Hukum dan Organisasi	3,20	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Pelayanan Publik Biro Hukum dan Organisasi	4,70	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Reformasi Hukum	100,00	Indeks	0,00	0,00%
		Jumlah Dokumen Penataan organisasi yang dihasilkan	4,00	Dokumen	0,00	0,00%
		Jumlah Kebijakan Reformasi birokrasi yang ditetapkan	2,00	Kebijakan	0,00	0,00%
		Nilai pembangunan ZI Biro Hukum dan Organisasi	92,50	Nilai	0,00	0,00%
		Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM	4,22	Nilai	0,00	0,00%
		Persentase Bantuan Hukum yang ditindaklanjuti	100,00	Persentase	100,00	100,00%
		Persentase Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,70	Persentase	0,00	0,00%
		Persentase Pemenuhan dokumen SAKIP Biro Hukum dan Organisasi sesuai standar	100,00	Persentase	55,00	55,00%
		Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang diselesaikan	100,00	Persentase	100,00	100,00%
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai sistem manajemen pengawasan obat dan makanan yang terintegrasi	100,00	Persentase	0,00	0,00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
		Persentase UPT yang melaksanakan KIE sesuai pedoman	55,00	Persentase	0,00	0,00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organsiasi	100,00	Nilai	100,00	100,00%
		Tingkat Kepatuhan Standar Layanan Publik	94,15	Nilai	0,00	0,00%
		Tingkat Tindak Lanjut pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	4,00	Nilai	0,00	0,00%
2.4	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Indeks Kesejahteraan Pegawai	3,33	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Manajemen Risiko Biro SDM	3,70	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks NSPK Manajemen ASN	93,50	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Sistem Merit	0,97	Indeks	0,00	0,00%
		Nilai Pembangunan ZI Biro SDM	87,76	Nilai	0,00	0,00%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Biro SDM sesuai standar	100,00	Persentase	55,00	55,00%
		Persentase SDM BPOM yang Dikembangkan Kariernya Sesuai Ketentuan	90,00	Persentase	0,00	0,00%
		Persentase SDM BPOM Yang Terpetakan Sebagai Suksesor	100,00	Persentase	0,00	0,00%
		Persentase Talenta BPOM yang Dikembangkan Kariernya Melalui Talent Mobility Internal dan Eksternal	20,00	Persentase	0,00	0,00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro SDM	100,00	Nilai	90,00	90,00%
2.5	Pengembangan SDM Aparatur Badan POM	Indeks BerAKHLAK	65,00	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Manajemen Risiko PPSDM	3,05	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Pelayanan Publik PPSDM POM	4,05	Indeks	0,00	0,00%
		Nilai AKIP PPSDM	80,15	Nilai	0,00	0,00%
		Nilai Kinerja Anggaran PPSDM	5,00	Nilai	0,00	0,00%
		Nilai Pembangunan ZI PPSDM	88,50	Nilai	0,00	0,00%
		Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya sesuai dengan perencanaan	70,00	Persentase	43,54	62,20%
		Persentase SDM Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Memenuhi Standar Kompetensi	88,00	Persentase	85,47	97,13%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
2.6	Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi Data dan Informasi Obat dan Makanan	Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	2,94	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,80	Indeks	0,00	0,00%
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	81,88	Nilai	0,00	0,00%
		Nilai Indeks SPBE	4,59	Nilai	4,55	99,13%
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	97,47	Nilai	0,00	0,00%
		Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	86,52	Nilai	0,00	0,00%
		Persentase data dan sistem informasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi	20,00	Persentase	0,00	0,00%
2.7	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I	88,48	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I	3,60	Indeks	0,00	0,00%
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20,73	Nilai	0,00	0,00%
		Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,90	Nilai	0,00	0,00%
		Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	4,20	Nilai	0,00	0,00%
		Nilai Pembangunan ZI Inspektorat I	89,12	Nilai	0,00	0,00%
		Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	84,60	Nilai	0,00	0,00%
		Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas	73,70	Persentase	0,00	0,00%
		Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat I yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100,00	Persentase	100,00	100,00%
		Persentase layanan jasa Konsultasi pada mitra kerja inspektorat I yang ditindaklanjuti tepat waktu	100,00	Persentase	100,00	100,00%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat I sesuai standar	100,00	Persentase	45,45	45,45%
		Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100,00	Persentase	71,43	71,43%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	96,18	Persentase	0,00	0,00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
2.8	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Persentase rekomendasi pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti	93,57	Persentase	95,64	102,21%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	100,00	Nilai	75,00	75,00%
		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II	88,33	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	3,20	Indeks	0,00	0,00%
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20,73	Nilai	0,00	0,00%
		Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,90	Nilai	0,00	0,00%
		Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	4,20	Nilai	0,00	0,00%
		Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II	86,08	Nilai	0,00	0,00%
		Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	84,60	Nilai	0,00	0,00%
		Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas	73,70	Persentase	0,00	0,00%
		Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat II yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100,00	Persentase	100,00	100,00%
		Persentase layanan jasa Konsultasi pada mitra kerja inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	100,00	Persentase	100,00	100,00%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat II sesuai standar	100,00	Persentase	45,45	45,45%
		Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100,00	Persentase	50,00	50,00%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	96,18	Persentase	0,00	0,00%
		Persentase rekomendasi pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti	93,26	Persentase	96,39	103,36%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	100,00	Nilai	95,00	95,00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW I 2025	Capaian (%)
2.9	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Indeks Manajemen Risiko Biro Umum	2,65	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Pengelolaan Aset	3,31	Indeks	0,00	0,00%
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	88,30	Indeks	0,00	0,00%
		Nilai Pembangunan ZI Biro Umum	83,50	Nilai	0,00	0,00%
		Persentase Keberhasilan Koordinasi Dalam Layanan Keprotokolan dan Kesekretariatan Pimpinan	94,10	Persentase	97,56	103,68%
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Biro Umum sesuai Standar	100,00	Persentase	55,00	55,00%
		Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang kinerja pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai perencanaan	100,00	Persentase	60,00	60,00%
		Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	62,00	Persentase	0,00	0,00%
		Tingkat Digitalisasi Arsip	98,28	Nilai	0,00	0,00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum	100,00	Nilai	100,00	100,00%



LAMPIRAN 2

Peringkat Realisasi Anggaran Unit Kerja Pusat

No	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
1	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	508.433.561.000	500.833.243.000	323.142.468.618	63,56%	64,52%
2	DIT. PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN	6.621.582.000	1.920.925.000	1.224.391.781	18,49%	63,74%
3	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	105.800.044.000	39.958.231.000	24.615.911.667	23,27%	61,60%
4	BIRO HUKUM DAN ORGANISASI	10.570.240.000	2.339.343.000	1.244.076.329	11,77%	53,18%
5	INSPEKTORAT I	14.194.827.000	8.657.245.000	4.487.704.789	31,62%	51,84%
6	DIT. PENGAWASAN PRODUKSI OBAT. NARKOTIKA. PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR	9.794.120.000	2.545.221.000	1.276.405.943	13,03%	50,15%
7	DIT. INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN	6.725.908.000	1.348.878.000	655.801.533	9,75%	48,62%
8	PUSAT PENGEMBANGAN SDM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	34.806.605.000	10.515.616.000	5.055.904.138	14,53%	48,08%
9	DIT. REGISTRASI OBAT	12.804.921.000	3.065.945.000	1.470.781.454	11,49%	47,97%
10	DIT. PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN	10.850.770.000	2.744.419.000	1.313.712.043	12,11%	47,87%
11	DIT. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL. SUPLEMEN KESEHATAN. DAN KOSMETIK	11.425.748.000	4.001.546.000	1.913.690.588	16,75%	47,82%
12	BIRO UMUM	132.865.586.000	78.355.537.000	36.847.524.045	27,73%	47,03%
13	BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	14.786.465.000	2.996.631.000	1.390.955.187	9,41%	46,42%
14	DIT. PENGAWASAN KOSMETIK	8.538.356.000	2.700.000.000	1.226.751.328	14,37%	45,44%
15	BALAI KALIBRASI	5.150.520.000	2.697.159.000	1.224.102.671	23,77%	45,38%
16	PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	44.521.934.000	27.469.122.000	12.241.804.293	27,50%	44,57%
17	DIT. REGISTRASI OBAT TRADISIONAL. SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	16.001.858.000	2.700.000.000	1.195.575.968	7,47%	44,28%
18	BALAI PENGUJIAN PRODUK BIOLOGI	6.892.255.000	3.735.324.000	1.642.019.889	23,82%	43,96%

No	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
19	INSPEKTORAT II	5.453.149.000	1.061.223.000	459.197.687	8,42%	43,27%
20	DIT. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN	17.367.797.000	4.961.317.000	1.999.349.056	11,51%	40,30%
21	PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN	12.859.156.000	4.952.858.000	1.964.902.369	15,28%	39,67%
22	DIT. STANDADISASI OBAT TRADISIONAL. SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	5.100.007.000	4.000.000.000	1.576.420.065	30,91%	39,41%
23	DIT. CEGAH TANGKAL	9.321.075.000	1.905.519.000	710.025.729	7,62%	37,26%
24	DIT. PENGAWASAN KEAMANAN. MUTU DAN EKSPOR IMPOR OBAT. NARKOTIKA. PSIKOTROPIKA. PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	12.290.695.000	2.903.165.000	1.070.708.622	8,71%	36,88%
25	DIT. PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN	14.078.148.000	3.597.319.000	1.313.989.271	9,33%	36,53%
26	DIT. REGISTRASI PANGAN OLAHAN	14.628.747.000	3.797.829.000	1.324.226.935	9,05%	34,87%
27	DIT. PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT. NARKOTIKA. PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR	7.174.431.000	2.193.150.000	717.161.605	10,00%	32,70%
28	DIT. STANDARDISASI OBAT. NARKOTIKA. PSIKOTROPIKA. PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	8.294.694.000	3.265.013.000	934.745.532	11,27%	28,63%
29	BIRO KERJASAMA	12.828.245.000	3.555.790.000	1.008.238.061	7,86%	28,35%
30	DIT. PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN	20.041.240.000	4.893.435.000	1.314.050.559	6,56%	26,85%
31	DIT. STANDRDISASI PANGAN OLAHAN	6.058.727.000	2.624.866.000	469.329.258	7,75%	17,88%
32	BALAI PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN MAKANAN	15.176.855.000	10.279.228.000	1.597.660.976	10,53%	15,54%
33	DIT. SIBER OBAT DAN MAKANAN	24.430.432.000	20.047.644.000	912.949.503	3,74%	4,55%

Peringkat Realisasi Anggaran Balai Besar/Balai POM

No	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
1	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM	21.781.026.000	17.407.387.000	10.508.495.475	48,25%	60,37%
2	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAMBI	37.377.367.000	16.877.225.000	10.153.789.673	27,17%	60,16%
3	BALAI POM DI JEMBER	7.689.766.000	5.722.185.000	3.383.060.421	43,99%	59,12%
4	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENPASAR	28.351.883.000	22.396.314.000	12.849.044.327	45,32%	57,37%
5	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKARAYA	22.128.308.000	17.229.500.000	9.510.565.511	42,98%	55,20%
6	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MANADO	35.802.820.000	28.458.697.000	15.677.171.656	43,79%	55,09%
7	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM	20.815.994.000	17.221.281.000	9.455.099.519	45,42%	54,90%
8	BALAI POM DI BANYUMAS	8.033.570.000	3.548.554.000	1.940.500.414	24,15%	54,68%
9	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG	32.249.036.000	21.879.415.000	11.755.687.602	36,45%	53,73%
10	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG	29.078.945.000	21.271.575.000	11.396.060.225	39,19%	53,57%
11	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI	28.846.708.000	15.258.670.000	8.055.321.433	27,92%	52,79%
12	BALAI POM DI PALOPO	6.756.241.000	5.389.794.000	2.818.264.582	41,71%	52,29%
13	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YOGYAKARTA	33.108.072.000	24.514.354.000	12.759.094.348	38,54%	52,05%
14	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI	23.993.072.000	15.077.438.000	7.822.072.964	32,60%	51,88%
15	BALAI BESAR POM DI KUPANG	32.161.658.000	19.702.696.000	10.219.417.822	31,78%	51,87%
16	BALAI POM DI TASIKMALAYA	36.430.090.000	5.974.726.000	3.054.885.056	8,39%	51,13%
17	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	65.046.406.000	40.055.253.000	20.393.058.562	31,35%	50,91%

No	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
18	BALAI POM DI TABALONG	3.583.112.000	2.709.911.000	1.377.552.387	38,45%	50,83%
19	BALAI POM DI SANGGAU	4.148.145.000	2.798.641.000	1.416.318.755	34,14%	50,61%
20	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON	26.128.121.000	18.570.769.000	9.136.770.597	34,97%	49,20%
21	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	45.651.891.000	29.664.269.000	14.469.834.304	31,70%	48,78%
22	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALEMBANG	29.738.436.000	20.140.560.000	9.816.315.445	33,01%	48,74%
23	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BENGKULU	26.079.443.000	16.269.871.000	7.821.159.858	29,99%	48,07%
24	BALAI POM DI TANJUNGBALAI	3.609.700.000	2.598.865.000	1.246.838.143	34,54%	47,98%
25	BALAI POM DI BIMA	3.809.763.000	2.723.996.000	1.291.957.367	33,91%	47,43%
26	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG	21.577.684.000	16.463.843.000	7.790.245.101	36,10%	47,32%
27	BALAI POM DI INDRAGIRI HULU	15.521.856.000	3.105.348.000	1.464.851.699	9,44%	47,17%
28	BALAI POM DI TULANG BAWANG	4.414.617.000	2.558.052.000	1.182.568.538	26,79%	46,23%
29	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAKASSAR	72.075.284.000	27.096.292.000	12.491.139.008	17,33%	46,10%
30	BALAI POM DI BALIKPAPAN	4.956.412.000	3.010.317.000	1.380.669.676	27,86%	45,86%
31	BALAI POM DI SURAKARTA	8.008.888.000	5.302.122.000	2.403.463.439	30,01%	45,33%
32	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG	53.902.531.000	31.638.851.000	14.109.564.668	26,18%	44,60%
33	BALAI POM DI BAU-BAU	4.608.538.000	3.494.955.000	1.537.845.191	33,37%	44,00%
34	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU	22.472.137.000	17.738.456.000	7.775.611.070	34,60%	43,83%
35	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	20.322.623.000	16.228.929.000	6.997.374.273	34,43%	43,12%
36	BALAI POM DI DUMAI	15.810.463.000	3.729.940.000	1.601.792.883	10,13%	42,94%
37	BALAI POM DI PAYAKUMBUH	27.338.900.000	6.487.032.000	2.635.851.115	9,64%	40,63%
38	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SOFIFI	11.678.251.000	8.407.844.000	3.305.055.159	28,30%	39,31%

No	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
39	BALAI POM DI KEDIRI	24.253.063.000	9.005.252.000	3.468.842.636	14,30%	38,52%
40	BALAI BESAR POM DI GORONTALO	14.628.300.000	10.896.448.000	4.068.356.127	27,81%	37,34%
41	BALAI POM DI BOGOR	9.854.603.000	8.737.020.000	3.144.121.187	31,91%	35,99%
42	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	66.390.943.000	36.886.313.000	13.247.304.816	19,95%	35,91%
43	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN	13.591.640.000	7.787.557.000	2.795.219.042	20,57%	35,89%
44	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADANG	36.739.481.000	24.195.467.000	8.234.697.639	22,41%	34,03%
45	BALAI BESAR POM DI BANJARBARU	24.456.634.000	18.989.971.000	6.451.587.065	26,38%	33,97%
46	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU	18.801.278.000	10.828.656.000	3.647.348.965	19,40%	33,68%
47	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK	29.962.179.000	22.463.406.000	7.008.624.825	23,39%	31,20%
48	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN	49.118.801.000	30.684.818.000	9.480.885.890	19,30%	30,90%
49	BALA BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKAN BARU	37.929.994.000	29.818.648.000	8.999.106.104	23,73%	30,18%
50	BALAI POM DI TANGERANG	11.260.846.000	9.351.715.000	2.595.819.064	23,05%	27,76%
51	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SAMARINDA	31.276.628.000	26.664.850.000	7.396.161.109	23,65%	27,74%
52	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA	29.366.479.000	20.191.206.000	4.912.044.004	16,73%	24,33%
53	BALAI POM DI ENDE	11.944.107.000	8.552.370.000	1.249.246.019	10,46%	14,61%

Peringkat Realisasi Anggaran Loka POM

No	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
1	LOKA POM DI KABUPATEN SIJUNJUNG	3.062.441.000	2.206.520.000	1.321.431.985	43,15%	59,89%
2	LOKA POM DI KABUPATEN BUNGO	3.602.436.000	2.702.294.000	1.466.231.197	40,70%	54,26%
3	LOKA POM DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR	3.584.118.000	2.660.607.000	1.418.601.523	39,58%	53,32%
4	LOKA POM DI KABUPATEN BULELENG	3.798.317.000	2.706.872.000	1.395.444.703	36,74%	51,55%
5	LOKA POM DI KABUPATEN TANAH BUMBU	4.330.269.000	2.815.633.000	1.445.430.181	33,38%	51,34%
6	LOKA POM DI KABUPATEN BANGGAI	3.380.807.000	2.340.223.000	1.196.348.981	35,39%	51,12%
7	LOKA POM DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	3.453.941.000	2.493.399.000	1.233.270.808	35,71%	49,46%
8	LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU	3.620.893.000	2.682.062.000	1.318.475.744	36,41%	49,16%
9	LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG	21.277.069.000	3.438.363.000	1.672.966.952	7,86%	48,66%
10	LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI	3.549.671.000	2.436.077.000	1.177.365.470	33,17%	48,33%
11	LOKA POM DI KABUPATEN BELITUNG	3.471.918.000	2.531.344.000	1.181.473.325	34,03%	46,67%
12	LOKA POM DI KABUPATEN MIMIKA	4.261.865.000	3.213.409.000	1.492.045.929	35,01%	46,43%
13	LOKA POM DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT	3.732.622.000	2.592.293.000	1.179.702.581	31,61%	45,51%
14	LOKA POM DI ACEH SELATAN	3.479.978.000	2.581.771.000	1.169.139.953	33,60%	45,28%
15	LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	3.733.890.000	2.593.790.000	1.166.234.261	31,23%	44,96%
16	LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG	3.597.820.000	2.604.779.000	1.165.465.465	32,39%	44,74%
17	LOKA POM DI KABUPATEN SORONG	8.807.236.000	3.823.564.000	1.658.240.571	18,83%	43,37%
18	LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE	3.927.558.000	2.607.132.000	1.093.103.307	27,83%	41,93%
19	LOKA POM DI ACEH TENGAH	9.428.678.000	3.123.514.000	1.262.416.744	13,39%	40,42%
20	LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	12.282.785.000	3.124.467.000	1.180.264.603	9,61%	37,77%



Halo BPOM : 1200533



website : www.pom.go.id



Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560, Indonesia